PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan Syukur ke hadirat Allah S.W.T, atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 telah selesai disusun dengan tepat waktu. Penyusunan LPPD merupakan amanat konstitusional dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini merupakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good local governance).

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan LPPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan perlindungan, ridho dan barokah dalam kita melakukan amanah mewujudkan Kepulauan Selayar yang Maju dan Sejahtera.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepulauan Selayar, 26 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUHAMMAD NATSIR ALI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN GRAFIK vi

BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang 1
I.1.1. Penjelasan Umum 1
A. Dasar Hukum 1
B. Kondisi Geografis Daerah 6
C. Perkembangan Penduduk 23
D. Kecamatan, Desa dan Kelurahan 27
E. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil 30
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 36
I.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 40
A. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pemerintah Daerah 40
B. Visi dan Misi Kepala Daerah 48
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah 53
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2024 61
I.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 63

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
II.1. Capaian Kinerja Makro 71
II.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 72
II.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) 72
II.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 89
II.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 92
II.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 92
II.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 94

II.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah 99
II.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Dan Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 99
II.3.5. Analisis Evektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 140

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 147
3.1. Tugas Pembantuan Dari Pusat Dan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Urusan Pemerintahan 147
3.2. Permasalahan dan Kendala 157

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 158
A. Bidang Urusan Pendidikan 158
B. Bidang Urusan Kesehatan 166
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum 196
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat 204
E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 211
F. Bidang Urusan Sosial 232
G. Program dan Kegiatan 247

BAB V PENUTUP 248

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	8
Tabel 1.2	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Selayar	9
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	24
Tabel 1.4	Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	25
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022-2024	26
Tabel 1.6	Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	28
Tabel 1.7	Unit Kerja Perangkat Daerah dan Tipe Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	31
Tabel 1.8	Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan	33
Tabel 1.9	Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	33
Tabel 1.10	Jumlah ASN Jabatan Fungsional dan PPPK berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	34
Tabel 1.11	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan	34
Tabel 1.12	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	35
Tabel 1.13	Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2024	36
Tabel 1.14	Realisasi Dana Perimbangan Daerah 2024	37
Tabel 1.15	Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah	38
Tabel 1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	38
Tabel 1.17	Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan	40
Tabel 1.18	Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026	48
Tabel 1.19	Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026	50
Tabel 1.20	Keadaan Status Desa pada Tahun 2021 dan 2026	58
Tabel 1.21	Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024	69
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pertanian	152

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pangan 155
Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 159
Tabel 4.2 Realisasi SPM Bidang Pendidikan 163
Tabel 4.3 Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024..... 166
Tabel 4.4 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan..... 168
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2024 180
Tabel 4.6 Jumlah Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2024..... 180
Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2024 181
Tabel 4.8 Realisasi SPM Bidang Pendidikan 181
Tabel 4.9 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum..... 196
Tabel 4.10 Jumlah Personil ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan 199
Tabel 4.11 Jumlah Personil Non ASN Berdasarkan Pendidikan 200
Tabel 4.12 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum 200
Tabel 4.13 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat 205
Tabel 4.14 Jumlah Personil ASN Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Pangkat 207
Tabel 4.15 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat 208
Tabel 4.16 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum 212
Tabel 4.17 Jumlah Personil Aktif Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024 214
Tabel 4.18 Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan 214
Tabel 4.19 Realisasi SPM Bidang Trantibum 214
Tabel 4.20 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan 217
Tabel 4.21 Data Pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .. 220
Tabel 4.22 Realisasi SPM Sub Urusan Kebencanaan 221

Tabel 4.23 Target Pencapaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran 226
Tabel 4.24 Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan 229
Tabel 4.25 Sarana Realisasi SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran 230
Tabel 4.26 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 233
Tabel 4.27 Realisasi SPM Bidang Sosial 239
Tabel 4.28 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024 247
Tabel 4.29 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024..... 249
Tabel 4.30 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024..... 251
Tabel 4.31 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 252
Tabel 4.32 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024 253
Tabel 4.33 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2024..... 255
Tabel 4.34 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 256
Tabel 4.35 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024 257

DAFTAR
GAMBAR, DIAGRAM DAN GRAFIK

Halaman

Gambar 1.1	Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar.....	6
Diagram 1.1	Luas dan Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	8
Gambar 1.2	Peta Jaringan Transportasi Darat	18
Gambar 1.3	Peta Jarigan Transportasi Laut	19
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	25
Grafik 1.2	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	27

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

I.1.1. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun sistematika penulisan dalam LPPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu : Bab I : Pendahuluan; Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; Bab IV : Penerapan dan Pencapaaian Standar Pelayanan Minimal; dan Bab V : Penutup.

A. DASAR HUKUM

Adapun Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 201);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 837);

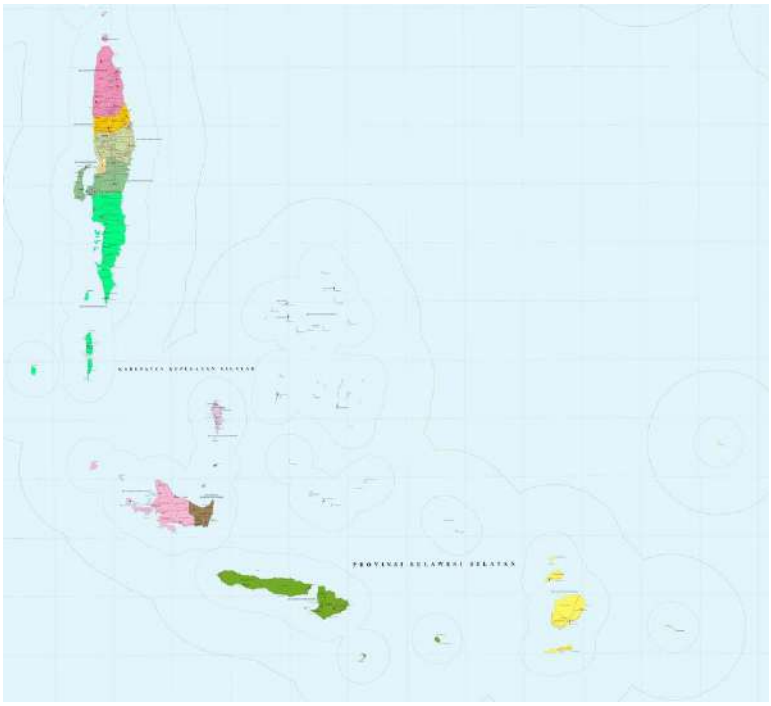
B. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Secara astronomis, Kepulauan Selayar terletak diantara 5°40' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
Tahun 2008

a) Luas Wilayah

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km²dimana luas daratan 1.357,03 km², sedangkan luas laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai 670 km. Secara administratif, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81(delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibukotanya Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng ibukotanya Benteng, Kecamatan Bontoharu ibukotanya Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya Polebunging, Kecamatan Buki ibukotanya Buki dan Kecamatan Bontomatene ibukotanya Batangmata.

Berdasarkan luas wilayahnya, Kecamatan Bontosikuyu merupakan kecamatan yang paling luas yakni 248,22 km², disusul Kecamatan Pasimarannu yang meliputi pulau Bonerate dan Pulau Lambego (Kalao) dengan luas 195,33 km². Selanjutnya Kecamatan Bontomatene yang terletak di ujung utara Pulau Selayar seluas 193,05 km². Sementara Kecamatan Benteng yang juga melingkupi ibukota kabupaten tercatat sebagai kecamatan terkecil dengan luas 24,63 km². Berikut adalah rincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

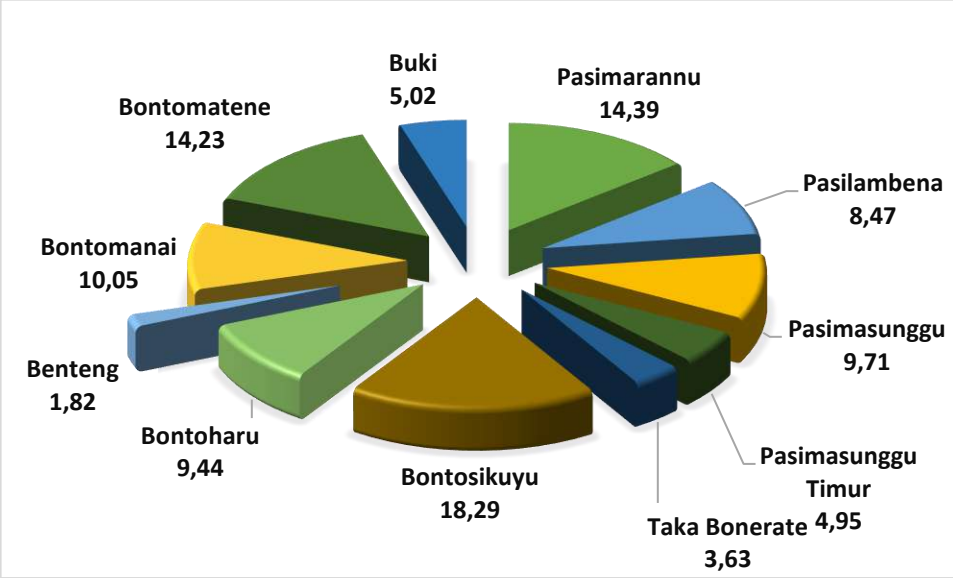
Tabel 1.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase
1	Pasimarannu	195,33	14,39
2	Pasilambena	114,88	8,47
3	Pasimasunggu	131,80	9,71
4	Pasimasunggu Timur	67,14	4,95
5	Taka Bonerate	49,30	3,63
6	Bontosikuyu	248,22	18,29
7	Bontoharu	128,12	9,44
8	Benteng	24,63	1,82
9	Bontomanai	136,42	10,05
10	Bontomatene	193,05	14,23
11	Buki	68,14	5,02

Diagram 1.1 ditampilkan persentase luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kecamatan Takabonerate merupakan kecamatan dengan persentase luas terbesar sebesar 16% disusul kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Pasimarannu, masing – masing sebesar 15% dan 13%.

Diagram 1.1
Luas dan Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar



Ditinjau dari jarak ibukotanya ke ibukota kabupaten, jarak kecamatan-kecamatan yang ada sangat bervariasi, dari yang dekat, jauh dan sangat jauh. Kecamatan terdekat tentu saja adalah Kecamatan Benteng yang melingkupi ibukota kabupaten disusul Kecamatan Bontoharu yang berjarak 3 (tiga) kilometer sedangkan yang terjauh adalah Kecamatan Pasilambena yang berjarak kurang lebih 193 km dengan waktu tempuh terkadang sampai sehari penuh dengan menggunakan perahu motor. Berikut rincian jarak dari ibukota setiap kecamatan ke ibukota kabupaten :

Tabel 1.2
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Pasimarannu	Bonerate	±140
2	Pasilambena	Latokdok	±193
3	Pasimasunggu	Benteng Jampea	±85
4	Pasimasunggu Timur	Ujung Jampea	±96
5	Taka Bonerate	Batang	±75
6	Bontosikuyu	Pariangan	±18
7	Bontoharu	Matalalang	±3
8	Benteng	Benteng	0
9	Bontomanai	Polebungin	±18
10	Bontomatene	Batangmata	±27
11	Buki	Buki	±19

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam yang selama ini

digunakan sebagai jalur lalulintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Lebih jauh, pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar didukung pula oleh potensi sumberdaya alamterutama sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

b) Topografi

Fisiografi Pulau Selayar berdasarkan kondisi batuan dan kontrol struktur geologi penyusunnya maka dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:

a. Satuan morfologi daratan alluvial pantai.
b. Satuan morfologi perbukitan bergelombang.
c. Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat Pulau Selayar yang terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal secara dominan menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi disini diantaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut.

Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan

kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan.

c) Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan batu gamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batu pasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen. Penyebaran batuan Formasi Walanae memanjang di bagian barat Pulau Selayar dari utara ke selatan. Batu gamping Selayar penyebarannya terutama di bagian utara dan barat, dan terdiri dari batu gamping pejal, batu gamping koral, dan kalkarenit dengan sisipan napal dan batu pasir gampingan.

Kondisi geologi pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus perlapisannya relatif utara-selatan.

d) Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan *(straight)* rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di Selayar sulit diukur. Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan *(aresian aquifes)* dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas *(watertable groundwater)* dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 – 6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang

ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah termanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang Lembang, Bonto dan sebelah timur Tile-tile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan *catchment area* sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan Utara.

e) Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kondisi keterpisahan tersebut diperparah dengan infrastruktur (aksesibilitas) yang masih terbatas, dan ini sangat berpengaruh terhadap laju pemeratan pembangunan karena transportasi ekonomi tidak efisien. Namun demikian dalam perspektif pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kondisi tersebut memiliki nilai strategis.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur NKRI dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensil dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate.

Terkait dengan kondisi tersebut serta dalam rangka pemerataan pembangunan KTI, kawasan utara Pulau Selayar dinilai memiliki peranan penting dalam mentransformasikan Kabupaten Kepulauan Selayar, dari salah satu daerah tertinggal di KTI menjadi daerah yang maju dan mandiri. Keadaan tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan kawasan utara Pulau Selayar sebagai Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;

c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
2. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Secara lebih spesifik terkait pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu, pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, pada Paragraf 10 Zona Industri Pasal 23 angka (2) hufuf b disebutkan KPU-ID-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-ID-PI-01. Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8/Q.02/PTSP/2019 tentang Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, mengizinkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu dengan luas kawasan 51 Ha, dan lokasi kawasan di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebelumnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 590/XI/Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan

Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sekitar 51 Ha (Lima puluh satu hektar) dengan titik koordinat pada posisi S : 06 derajat 24'04.9" dan 120 derajat 29'24,9".

Sehingga atas dasar arahan pengembangan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032, maupun Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 590/XI/Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8/Q.02/PTSP/2019 tentang Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Puau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 maka ditetapkan kembali 3 agenda strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung dan sekitarnya Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Taka Bonerate;
b. Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung Utara Pulau Selayar ; dan
c. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar;

Kawasan Pengembangan tersebut sebagai bentuk persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan Kabupaten

Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara umum. Pengembangan kawasan ini sebagai implikasi kebijakan Pemerintah melalui Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Inpres No.5/2008) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendagri No.19/2008) untuk percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat transaksi ekonomi terutama dalam meningkatkan arus barang dan jasa adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut di atas. Kawasan utara pulau Selayar sebagai Kawasan Bandar Niaga KTI pada hakikatnya akan berfungsi seperti "Batam"-nya KTI agar masalah riil saat ini yakni minimnya pasokan barang yang berimbas kepada kenaikan harga dan inflasi yang penyebab utamanya adalah sistem logistik yang tidak efektif dan efisien di KTI dapat segera teratasi.

f) Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang merupakan suatu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

a. Pusat-pusat kegiatan terdiri dari:
   - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi kawasan perkotaan Benteng dan kawasan perkotaan Pamatata.
   - Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi kawasan perkotaan Kayuadi dan kawasan perkotaan Bonerate.

- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi kawasan perkotaan Matalalang, kawasan perkotaan Polebungin, kawasan perkotaan Batangmata, dan kawasan perkotaan Buki, kawasan perkotaan Benteng Jampea, dan kawasan perkotaan Latokdok. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Desa Bontosunggu, Desa Barugaiya, Desa Appatanah, Desa Lowa, Desa Lantibongan, Desa Onto, Desa Jinato, Desa Tambuna, Desa Rajuni, Desa Karumpa dan Desa Pulo Madu.

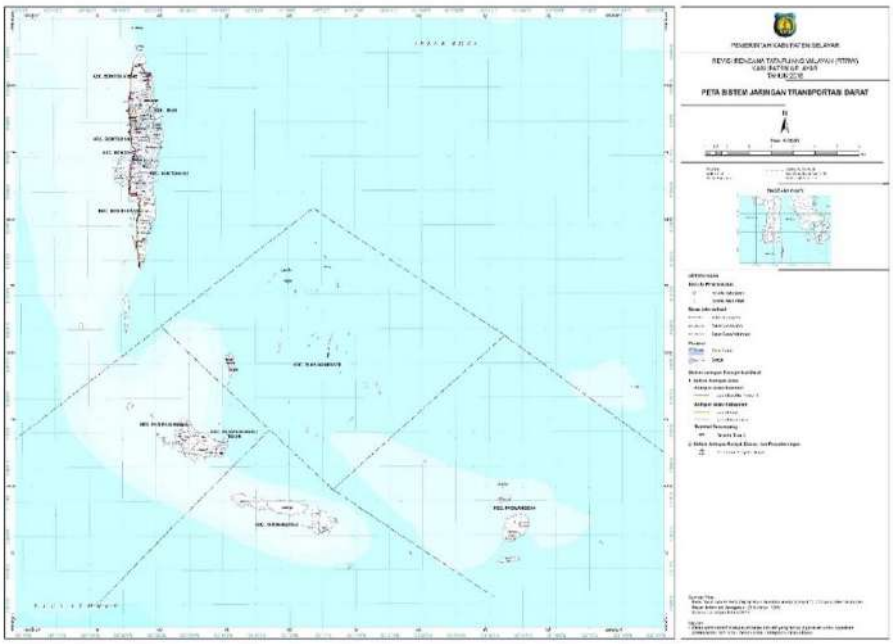
b. Sistem Jaringan Prasarana Utama terdiri dari:

- Sistem jaringan transportasi darat yang terdiri dari:

  1. Sistem jaringan jalan yang terdiri dari jaringan jalan kolektor (K1), Jariingan jalan kolektor primer (K4) dan rencana pengembangan jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan dan jaringan jalan lokal kabupaten.

  2. Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Gambar 1.2.
Peta Jaringan Transportasi Darat

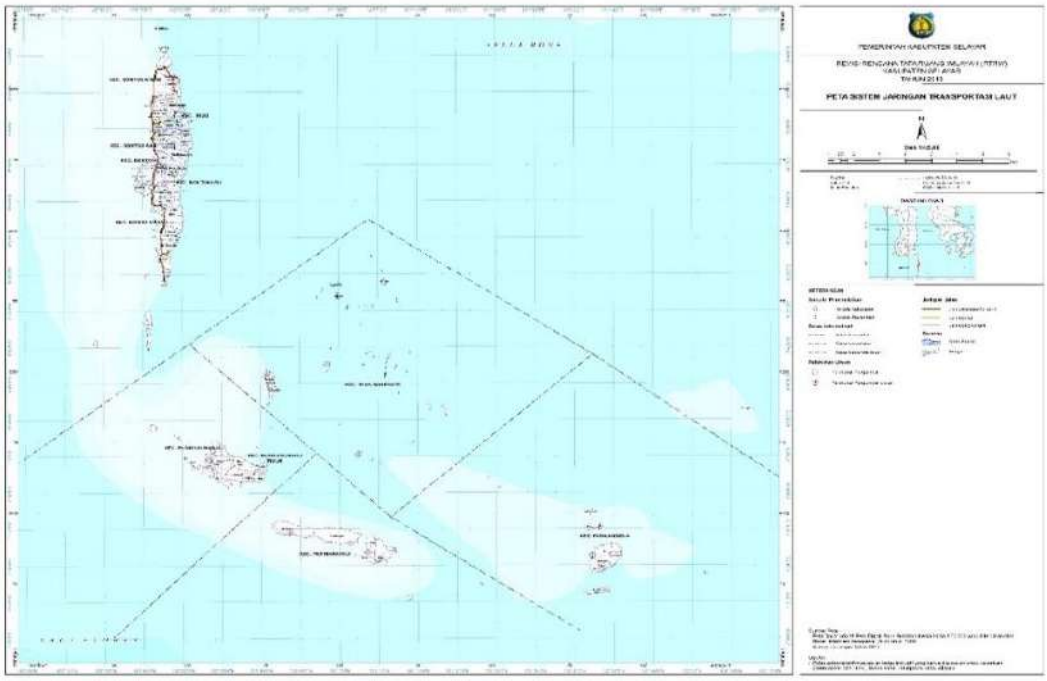


- Sistem jaringan transportasi laut yang terdiri dari:

  1. Tatanan kepelabuhanan yaitu pelabuhan pengumpul (pelabuhan Benteng dan pelabuhan Pamatata) dan pelabuhan pengumpan.
  2. Alur pelayaran yaitu alur pelayaran lokal, regional dan nasional.

Gambar 1.3.

Peta Jaringan Transportasi Laut



Sumber Data: RTRW Kab. Kepulauan Selayar

c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri dari sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

g) Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang peruntukannya kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari kawasan industri Pamatata, kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur, kawasan budidaya ikan karang di Kecamatan Bontoharu dan Takabonerate, kawasan pariwisata terpadu, kawasan perkotaan Kayuadi dan kawasan perkotaan Bonerate. Sedangkan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan lingkungan hidup merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang ditetapkan di Kecamatan Bontomanai, Bontomatene, Bontoharu, Takabonerate, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Pasimarannu dan Pasilambena.

h) Kawasan Kelautan dan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terbagi atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan ikan dan pelabuhan pendaratan ikan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Buki, Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu, Takabonerate, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Pasimarannu dan Pasilambena.

Untuk peruntukan budidaya perikanan terdiri atas budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng yang ditetapkan pada sebagian wilayah Bontosikuyu, sebagian wilayah Bontoharu, sebagian wilayah Pasimasunggu dan sebagian wilayah Pasimasunggu Timur. Kemudian kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut pada sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

Untuk kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Benteng dan Bontoharu, sedangkan untuk pelabuhan pendaran ikan ditetapkan akan dikembangkan di PPI Bonehalang Kecamatan Benteng.

i) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terbagi atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan 4.057 hektar dan lahan kering dengan luasan kurang lebih 518 hektar. Kawasan peruntukan lahan basah ditetapkan di sebagian wilayah Bontomatene, sebagian wilayah Buki, sebagian wilayah Bontomanai, sebagian wilayah Bontoharu dan sebagian wilayah Bontosikuyu. Sedangkan kawasan peruntukan lahan kering ditetapkan di sebagian wilayah Pasimarannu dan sebagian wilayah Pasimasunggu Timur.

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dengan luasan 1.984 hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk komoditas sayur-sayuran dengan luasan 1.928 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Bontomatene, sebagian wilayah Buki, sebagian wilayah Bontomanai, sebagian wilayah Benteng, sebagian wilayah Bontoharu, sebagian wilayah Takabonerate, sebagian wilayah Pasimasunggu, sebagian wilayah Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Pasimarannu dan sebagian wilayah Pasilambena.

j) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata budaya ditetapkan pada Gong Nekara, Meriam Kuno dan Jangkar Raksasa di Kecamatan Bontoharu, Perkampungan Tua dan Mesjid Tua Gantarang di Kecamatan Bontomanai. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas: Taman Nasional Takabonerate di perairan Kecamatan Takabonerate; wisata bahari di perairan Pulau Tambolongan, Polassi dan Bahuluang di Kecamatan Bontosikuyu dan Pulau Kayuadi di Kecamatan Takabonerate; dan wisata pantai di kecamatan

Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate dan Kecamatan Pasilambena. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas: kawasan agrowisata di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontomanai; dan kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu.

k) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara dan wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, meliputi besi, mangaan, seng, emas, dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Buki, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam, meliputi fosfat dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu. Dan wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah liat, pasir laut, urukan tanah setempat, batu gunung, batu kali, kerikil, dan granit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, dan sebagian wilayah Kecamatan Benteng.

Wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar

yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu.

l) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas kawasan industri Pamatata yang merupakan kawasan pengolahan dan penyimpanan minyak bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, dan kawasan industri perikanan terpadu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Benteng dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, dan kawasan industri pembuatan kapal dan peralatan rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Benteng dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu.

Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayahKecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu.

C. Perkembangan Penduduk

a. Kepadatan Penduduk Geografis

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Kepulauan Selayar

KECAMATAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Pasimarannu	10.810	10.846	10.915	11.065
Pasilambena	8.317	8.465	8.578	8.722
Pasimasunggu	9.094	9.179	9.261	9.433
Taka Bonerate	13.988	14.209	14.774	15.101
Pasimasunggu Timur	8.011	8.072	8.099	8.218
Bontosikuyu	15.803	15.918	16.030	16.164
Bontoharu	14.917	15.031	15.325	15.489
Benteng	24.768	24.585	24.514	24.378
Bontomanai	14.124	14.148	14.119	14.079
Bontomatene	13.596	13.557	13.565	13.522
Buki	6.894	6.871	6.920	6.925
JUMLAH	140.322	140.881	142.100	143.096

Sumber : Disdukcapil Kep. Selayar 2025

b. Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

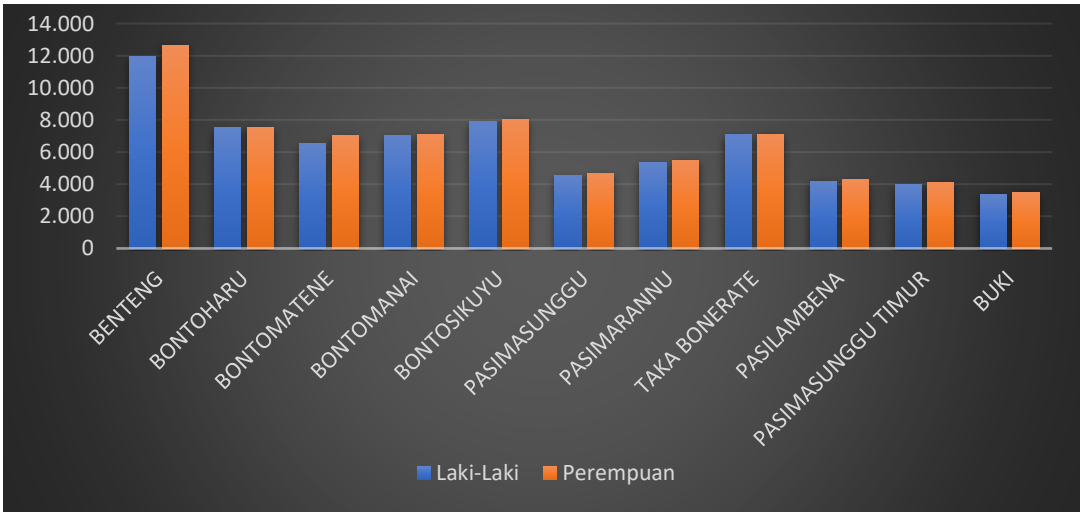
Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya.Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Adapun gambaran sebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jenis kelamin diurai pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		(JIWA)	%	(JIWA)	%	(JIWA)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BENTENG	11.802	8,25	12.576	8,79	24.378	17,04
2	BONTOHARU	7.696	5,38	7.793	5,45	15.489	10,82
3	BONTOMATENE	6.500	4,54	7.022	4,91	13.522	9,45
4	BONTOMANAI	7.004	4,89	7.075	4,94	14.079	9,84
5	BONTOSIKUYU	8.028	5,61	8.136	5,69	16.164	11,30
6	PASIMASUNGGU	4.649	3,25	4.784	3,34	9.433	6,59
7	PASIMARANNU	5.437	3,80	5.628	3,93	11.065	7,73
8	TAKA BONERATE	7.540	5,27	7.561	5,28	15.101	10,55
9	PASILAMBENA	4.311	3,01	4.411	3,08	8.722	6,10
10	PASIMASUNGGU TIMUR	4.031	2,82	4.187	2,93	8.218	5,74
11	BUKI	3.407	2,38	3.518	2,46	6.925	4,84
JUMLAH TOTAL		**70.405**	**49,20**	**72.691**	**50,80**	**143.096**	**100,00**

Sumber : Dukcapil Kep. Selayar 2025

Grafik 1.1.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Dukcapil Kep. Selayar 2025

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak merata. Daerah yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki terbanyak di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu di Kecamatan Benteng sebanyak 11.802 jiwa, Disusul Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 8.028 jiwa, dan Kecamatan Bontoharu sebanyak 7.696 jiwa. Demikian juga halnya, jumlah penduduk perempuan yang terbanyak di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada tiga kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Benteng sebanyak 12.576 jiwa, kemudian Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 8.136 jiwa, dan Kecamatan Bontoharu sebanyak 7.793 jiwa. Sementara itu, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki terendah adalah Kecamatan Buki sebanyak 3.407 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terendah adalah Kecamatan Buki sebanyak 3,518 jiwa.

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tumbuh 0,7% pada tahun 2024, Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebanyak 142.100 jiwa dan tahun 2024 sebanyak 143.096 jiwa (Tabel 1.7), terdiri dari laki-laki sebanyak 70.405 jiwa dan perempuan sebanyak 72.691 jiwa.

Tabel 1.8.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2023-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		2023	2024
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	142.100	143.096
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,87	0,7
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km2	104,71	105,45

Sumber : DUKCAPIL Kepulauan Selayar 2025

Grafik 1.2.
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2024



D. KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Berikut adalah rincian kecamatan, desa dan kelurahan:

Tabel 1.6.
Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Ket
1	Bontomatene	Desa Barat Lambongan Desa Bontona Saluk Desa Pamatata Desa Onto Desa Maharayya Desa Tanete Desa Menara Indah Desa Bungaiya Desa Kayu Bauk Desa Tamalanrea Kelurahan Batangmata Kelurahan Batangmata Sapo	
2	Buki	Desa Buki Desa Lalang Bata Desa Balang Butung Desa Kohala Desa Bontolempangan Desa Mekar Indah Desa Buki Timur	
3	Bontomanai	Desa Polebungin Desa Mare-Mare Desa Bonea Makmur Desa Jambuiya Desa Bontomarannu Desa Bonea Timur Desa Barugaiya Desa Parak Desa Bontokoraang Desa Kaburu	
4	Benteng	Kelurahan Benteng Kelurahan Benteng Selatan Kelurahan Benteng Utara	
5	Bontoharu	Desa Bontolebang Desa Bontosunggu Desa Botoborusu Desa Bontotangnga Desa Kahu-Kahu Desa Kalepadang Kelurahan Bontobangung Kelurahan Putabangung	

6	Bontosikuyu	Desa Harapan Desa Lowa Desa Appatanah Desa Laiyolo Baru Desa Lantibongan Desa Patilereng Desa Patikarya Desa Binanga Sombaiya Desa Laiyolo Desa Tambolongan Desa Polassi Desa Khusus Bahuluang	
7	Takabonerate	Desa Kayuadi Desa Jinato Desa Tarupa Desa Nyiur Indah Desa Latondu Desa Rajuni Desa Batang Desa Tambuna Desa Khusus Pasitallu	
8	Pasimasunggu	Desa Kembangragi Desa Maminasa Desa Tanamalala Desa Labuang Pamajang Desa Massungke Desa Bontosaile Desa Teluk Kampe	
9	Pasimasunggu Timur	Desa Bontobulaeng Desa Bontobaru Desa Bontomalling Desa Lembang Baji Desa Bontojati Desa Ujung	
10	Pasimarannu	Desa Bonea Desa Batu Bingkung Desa Lambego Desa Majapahit Desa Bonerate Desa Komba-Komba Desa Sambali Desa Lamantu	

11	Pasilambena	Desa Kalaotoa Desa Lembang Matene Desa Garaupa Desa Pulo Madu Desa Karumpa Desa Garaupa Raya	

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda

E. PERANGKAT DAERAH, UNIT PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka elemen Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat Daerah;

d. Dinas Daerah;

e. Badan Daerah; dan

f. Kecamatan.

2. Unit Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Unit Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 37, yang terdiri dari 2 Sekertariat, 1 Inspektorat, 19 Dinas, 4 Badan, 11 Kecamatan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.7.
Unit Kerja Perangkat Daerah dan Tipe
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	NAMA UNIT KERJA	TIPE
A. Sekretariat Daerah		A
B. Sekretariat DPRD		C
C. Inspektorat Daerah		A
D. DINAS DAERAH		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	A
2	Dinas Kesehatan	A
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	A
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A
6	Dinas Sosial	B
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	A
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A
9	Dinas Lingkungan Hidup	A
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	B
12	Dinas Perhubungan	A
13	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	A
14	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	A
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B

17	Dinas Perikanan	A
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	A
19	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	A
E. BADAN DAERAH		
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	A
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
F. KECAMATAN		
1	Pasilambena	A
2	Pasimarannu	A
3	Pasimasunggu Timur	A
4	Pasimasunggu	A
5	Taka Bonerate	A
6	Bontosikuyu	A
7	Bontoharu	A
8	Benteng	A
9	Bontomanai	A
10	Buki	A
11	Bontomatene	A

3. Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Data Tahun 2024, Sekitar 4.231 Aparatur Sipil Negara dari instansi nonvertikal bekerja di Kepulauan Selayar. Berdasarkan pendidikan sebanyak 4.218 ASN memiliki pendidikan SMA keatas. Untuk persebaran Golongan Kepangkatan, 8 ASN berada di golongan I, sebanyak 234 ASN

berada di golongan II, dan 2.221 ASN berada di golongan III serta 774 ASN berada di golongan IV.

Tabel 1.8

Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	3	-	3
2	SMP	10	-	10
3	SMA	226	169	395
4	DI	1	1	2
5	DII	21	44	65
6	DIII	89	256	345
7	S1/DIV	1154	2000	3154
8	S2	106	148	254
9	S3	2	1	3
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA		**1612**	**2619**	**4231**

Sumber : BKPPD Tahun 2025

Adapun Jumlah PNS berdasarkan eselon digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.9
Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ESELON IIA	1	-	1
2	ESELON IIB	22	5	27
3	ESELON IIIA	28	21	49
4	ESELON IIIB	51	38	89
5	ESELON IVA	98	89	187

6	ESELON IVB	37	27	64
7	ESELON VA	0	0	0
	JUMLAH JABATAN STRUKTURAL	**237**	**180**	**417**

Sumber : BKPPD Tahun 2025

Tabel 1.10.
Jumlah ASN Jabatan Fungsional dan PPPK berdasarkan Jenis Kelamin

NO	TINGKATAN ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Jabatan Fungsional Tertentu	684	1.541	2.225
2	Jabatan Fungsional Umum	318	277	595
3	Jabatan PPPK	251	743	994
JUMLAH		**1.253**	**2.561**	**3.814**

Sumber : BKPSDM Tahun 2025

Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Selayar tergambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Tahun 2024

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	GOLONGAN IV	**304**	**470**	**774**
1	Pembina Utama/IVe	-	1	1
2	Pembina Utama Madya/IVd	1	1	2
3	Pembina Utama Muda/IVc	37	45	82
4	Pembina Tingkat I/IVb	139	208	347
5	Pembina/IVa	127	215	342
	GOLONGAN III	**786**	**1435**	**2221**

6	Penata Tingkat I/IIId	275	545	820
7	Penata/IIIc	179	298	477
8	Penata Muda Tingkat I/IIIb	200	332	532
9	Penata Muda/IIIa	132	260	392
	GOLONGAN II	**141**	**93**	**234**
10	Pengatur Tingkat I/IId	62	57	119
11	Pengatur/IIc	54	26	80
12	Pengatur Muda Tingkat I/IIb	16	9	25
13	Pengatur Muda/IIa	9	1	10
	GOLONGAN I	**8**	**0**	**8**
14	Juru Tingkat I/Id	3	-	3
15	Juru/Ic	3	-	3
16	Juru Muda Tingkat I/Ib	2	-	2
17	Juru Muda/Ia	-	-	0
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA		**1239**	**1998**	**3237**

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

Aparatur Sipil Negara pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 417 PNS berada pada jabatan struktural, 595 PNS berada pada jabatan pelaksana, 596 PNS berada pada jabatan Fungsional Kesehatan, 1.301 PNS berada pada jabatan fungsional guru dan 328 PNS berada pada jabatan fungsional lainnya serta PPPK sebanyak 994. Adapun pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.12.
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

NO	NAMA JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JABATAN STRUKTURAL	237	180	417
2	FUNGSIONAL GURU	417	884	1301
3	FUNGSIONAL KESEHATAN	94	502	596
4	FUNGSIONAL LAINNYA	173	155	328

5	JABATAN PELAKSANA	318	277	595
6	PPPK	251	743	994
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA		**1490**	**2741**	**4231**

Sumber : BKPSDM Tahun 2024

F. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun 2024 pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.075.945.932.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 998.636.080.127,59 dengan capaian realisasi sebesar 92,81%, adapun realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kelompok pendapatan dan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.109.660.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.074.651.968,59 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 73,93%.

Tabel 1.13
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2024

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		**109.660.630.000,00**	**81.074.651.968,59**	**(28.585.978.031,41)**	**73,93**
1	28.271.091.400,00	13.600.326.209,00	14.670.765.191,00	48,11	65,75
2	47.922.113.000,00	47.644.653.893,00	277.459.107,00	99,42	59,16
3	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	772.748.323,80	93,95	97,55
4	20.688.925.600,00	7.823.920.190,39	12.865.005.409,61	37,82	87,86

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI, update per tanggal 12 Maret 2025

2. Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 960.523.452.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 917.561.428.159,00 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 95,53%.

Tabel 1.14

Realisasi Dana Perimbangan Daerah 2024

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN TRANSFER		**960.523.452.000,00**	**917.561.428.159,00**	**42.962.023.841,00**	**95,53**
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		**800.364.105.000,00**	**790.279.540.703,00**	**10.084.564.297,00**	**98,74**
1	15.375.649.000,00	15.401.372.000,00	(25.723.000,00)	100,17	100,00
2	620.900.520.000,00	620.495.260.651,00	405.259.349,00	99,93	100,71
3	44.244.896.000,00	42.731.502.855,00	1.513.393.145,00	96,58	88,21
B. Pendapatan Transfer Dana Pusat - Lainnya		119.843.040.000,00	111.651.405.197,00	8.191.634.803,00	93,16
1	**89.187.044.000,00**	**86.787.635.000,00**	**2.399.409.000,00**	**97,31**	0,00
2	67.830.496.000,00	65.431.087.000,00	2.399.409.000,00	96,46	83,18
C. Transfer Pemerintah Provinsi		21.356.548.000,00	21.356.548.000,00	0,00	100,00
1	**70.972.303.000,00**	**40.494.252.456,00**	**30.478.050.544,00**	**57,06**	105,40
2	53.458.831.000,00	26.405.597.145,00	27.053.233.855,00	49,39	52,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI, update per tanggal 12 Maret 2025

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.5.761.850.000,00 dan tidak terealisasi sama sekali atau dengan capaian realisasi anggaran 0,00%.

Tabel 1.15
Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah Tahun 2024

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**5.761.850.000,00**	**0,00**	**5.761.850.000,00**	**0,00**
1	5.761.850.000,00	0,00	5.761.850.000,00	0,00	80,11

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI, update per tanggal 12 Maret 2025

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.121.539.457.234,00 dan terealisasi sebesar Rp. 968.623.630.481,38 dengan capaian realisasi sebesar 86,37%, adapun realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudit disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2024

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Belanja Daerah		**1.121.539.457.234,00**	**968.623.630.481,38**	**152.915.826.752,62**	**86,37**
Belanja Operasi		**810.757.880.628,00**	**752.276.889.134,38**	**58.480.991.493,62**	**92,79**
1	Belanja Pegawai	445.759.240.505,00	421.937.421.030,76	23.821.819.474,24	94,66
2	Belanja Barang dan Jasa	311.334.935.234,00	284.692.232.048,62	26.642.703.185,38	91,44
3	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
4	Belanja Hibah	46.384.757.889,00	43.397.402.055,00	2.987.355.834,00	93,56
5	Belanja Bantuan Sosial	2.278.947.000,00	2.249.834.000,00	29.113.000,00	98,72
Belanja Modal		**170.807.153.166,00**	**145.606.619.567,00**	**25.200.533.599,00**	**85,25**
1	Belanja Modal Tanah	960.060.000,00	512.154.500,00	447.905.500,00	53,35
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.788.048.470,00	18.146.622.784,00	1.641.425.686,00	91,70

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.787.580.471,00	71.973.982.522,00	4.813.597.949,00	93,73
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.691.554.225,00	54.397.846.811,00	18.293.707.414,00	74,83
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	336.000.000,00	334.572.950,00	1.427.050,00	99,58
6	Belanja Modal Aset Lainnya	243.910.000,00	241.440.000,00	2.470.000,00	98,99
Belanja Tidak Terduga		**7.238.779.000,00**	**6.378.386.300,00**	**860.392.700,00**	**88,11**
1	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	860.392.700,00	88,11
Belanja Transfer		**132.735.644.440,00**	**64.361.735.480,00**	**68.373.908.960,00**	**48,49**
1	Belanja Bagi Hasil	2.183.257.440,00	1.641.045.485,00	542.211.955,00	75,17
2	Belanja Bantuan Keuangan	130.552.387.000,00	62.720.689.995,00	67.831.697.005,00	48,04

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI, update per tanggal 12 Maret 2025

1. Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 810.757.880.628,00 dan terealisasi sebesar Rp. 752.276.889.134,38 dengan capaian realisasi sekitar 92,79%.
2. Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 170.807.153.166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 145.606.619.567,00 dengan capaian realisasi sekitar 85,25%.
3. Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.238.779.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.378.386.300,00 dengan capaian realisasi sekitar 88,11%.
4. Transfer/Bagi Hasil pada perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 132.735.644.440,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.361.735.480,00 dengan capaian realisasi sebesar 48,49%.

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yakni berasal dari penerimaan pembiayaan yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, adapun realisasi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kelompok pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 1.17
Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Surplus/ Defisit		**(45.593.525.234,00)**	**30.012.449.646,21**		
Pembiayaan Daerah		**45.813.525.234,00**	**0,00**	**45.813.525.234,00**	**0,00**
Penerimaaan Pembiayaan		45.813.525.234,00	0,00	45.813.525.234,00	**0,00**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.813.525.234,00	0,00	45.813.525.234,00	0,00
Pembiayaan Netto		**45.813.525.234,00**	**0,00**	**45.813.525.234,00**	**0,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**220.000.000,00**	**30.012.449.646,21**	**(29.792.449.646,21)**	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI, update per tanggal 12 Maret 2025

I.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah dianggap prioritas etika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk prioritas dari level kebijakan nasional maupun propinsi yang bersifat mandatori. Dalam perumusan masalah pembangunan daerah dapat menggunakan pendekatan akar masalah, dimana dipetakan permasalahan melalui masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Masalah pokok merupakan masalah yang sifatnya makro bagi daerah, yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Masalah merupakan penyebab-penyebab dari masalah pokok, yang mana dapat

dipecahkan melalui rumusan strategi. Sementara akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, yang pemecahannya melalui rumusan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Berikut Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Pendidikan
   a. Tidak meratanya sebaran tenaga pendidik, khususnya di wilayah kepulauan;
   b. Masih rendahnya persentase guru dengan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum;
   c. Kurangnya motivasi anak untuk bersekolah yang disebabkan oleh motivasi dan pola pikir orangtua yang belum menyadari pentingnya pendidikan wajib 9 tahun.
2. Kesehatan
   a. Rendahnya rasio tenaga kesehatan;
   b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan;
   c. Kurangnya minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di wilayah kepulauan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Masih tingginya persentase jalan dengan kondisi rusak;
   b. Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi layak;
   c. Rencana Detail Tata Ruang belum semuanya disusun berdasarkan RTRW;
   d. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi;
   e. Masih kurangnya Panjang jaringan irigasi yang dibangun.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh khususnya di wilayah perkotaan;
   b. Rasio elektrifikasi yang masih rendah terutama di wilayah kepulauan;

c. Masih rendahnya cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
d. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a. Potensi rawan bencana gempa bumi di beberapa desa wilayah kepulauan serta potensi bencana banjir di beberapa wilayah;
   b. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat system peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi;
   c. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana;
   d. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air.
6. Sosial
   a. Masih tingginya persentase angka kemiskinan;
   b. Rendahnya persentase PMKS yang tertangani dan memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya;
   c. Rendahnya Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang menerima bantuan dan jaminan sosial;
   d. Belum tersedianya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sosial.
7. Tenaga Kerja
   a. Masih rendahnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja;
   b. Masih rendahnya daya serap tenaga kerja.
8. Komunikasi dan Informasi
   a. Masih terbatasnya jangkauan jaringan telekomunikasi dan internet;
   b. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih terfragmentasi dan belum terintegrasi.
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   a. Rendahnya produktivitas dan daya saing koperasi serta UMKM;
   b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kemajuan UMKM pasca pelatihan dan penyaluran bantuan.

10. Penanaman Modal
    a. Rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
    b. Menurunnya nilai investasi baik PMDN maupun PMA.
11. Kepemudaan dan Olahraga
    a. Kurang optimalnya sistem pembinaan olahraga dan pemuda;
    b. Kurangnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
12. Statistik
    a. Belum tersedianya sistem data sektoral dan statistik dasar yang terintegrasi.
13. Kebudayaan
    a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih minim;
    b. Masih kurangnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
14. Perpustakaan
    a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah dan perpustakaan desa;
    b. Menurunnya pengunjung perpustakaan setiap tahun.
15. Kearsipan
    a. Belum memadainya sistem pengelolaan arsip secara terpadu;
    b. Kurangnya SDM arsiparis.
16. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
    a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran dalam mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak.
17. Ketahanan Pangan
    a. Belum terciptanya diversifikasi konsumsi pangan oleh penduduk;
    b. Belum optimalnya sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
18. Pertanahan
    a. Rendahnya persentase luas lahan yang bersertifikat.
19. Lingkungan Hidup

a. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
b. Kurang optimalnya sistem penanganan sampah;
c. Rusaknya hutan dan kawasan lindung, serta alih fungsi daerah tangkapan air menjadi lahan terbangun.

20. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
    a. Efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah kepulauan;
    b. Masih rendahnya persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    a. Sebagian besar desa masih dengan kategori tertinggal;
    b. Belum optimalnya sistem pemberdayaan masyarakat desa;
    c. Mayoritas desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
22. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    a. Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera masih rendah;
    b. Kurangnya petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan;
    c. Belum optimalnya pencanangan kampung KB.
23. Perhubungan
    a. Masih rendahnya persentase kinerja lalu lintas kabupaten.
24. Kepariwisataan
    a. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD;
    b. Rendahnya pertumbuhan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar;
    c. Belum ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
25. Pertanian
    a. Tingkat ketersediaan air baku dan jaringan irigasi pertanian masih rendah;
    b. Belum optimalnya penanggulangan organisme pengganggu tanaman;

c. Belum optimalnya penanggulangan penyakit hewan;
d. Masih rendahnya cakupan bina kelompok tani.

26. Perdagangan
    a. Rendahnya produktifitas dan daya saing IKM bidang perdagangan dan jasa;
    b. Belum optimalnya sistem Tera/ Tera Ulang;
    c. Sarana dan prasarana alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) belum memadai.
27. Perindustrian
    a. Produktifitas dan daya saing IKM masih rendah;
    b. Belum terealisasinya program Pembangunan kawasan Distribusi Logistik (PDL) sebagai pusat distribusi logistik barang dan jasa kawasan timur Indonesia.
28. Kelautan dan Perikanan
    a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
    b. Belum adanya dukungan teknologi terhadap pengolahan produk hasil perikanan;
    c. Belum terealisasinya program Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu.
29. Pemerintahan Umum, Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengawasan
    a. Penerapan *e-government* belum maksimal;
    b. Perlunya penataan kelembagaan, evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai aturan yang berlaku;
    c. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19;
    d. Masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
    e. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
    f. Belum optimalnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi ASN;

g. Pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan belum optimal;
h. Masih adanya pelanggaran disiplin aparatur dan pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa perangkat daerah;
i. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

30. Kesatuan Bangsa dan Politik
    a. Perlunya optimalisasi pembinaan karakter masyarakat untuk menekan potensi terjadinya konflik.

2. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD yang lalu, dapat ditarik beberapa isu strategis, yaitu kondisi yang berpotensi menjadi masalah besar jika tidak dipecahkan segera maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang untuk berkembang sekaligus mensejahterakan masyarakat. Isu Strategis dimaksud berorientasi ke masa depan, sehingga untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan diintervensi secara konsisten.

Hal yang tak kalah pentingnya diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis disamping memperhatikan faktor internal dan eksternal dan dokumen terkait lainnya (RPJMN dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan), adalah kajian terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Tujuan kajian tersebut agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan kombinasi dan kajian terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih tersebut, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Status Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pertumbuhan

5. Meningkatkan Partisipasi dan Peranserta Masyarakat
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Selain isu strategis pembangunan 2021-2026 yang telah dikemukanan, perlu juga disampaikan bahwa ada beberapa **Program Strategis dan Program Prioritas Kepala Daerah** yang merupakan janji politik yang akan diimplementasikan lima tahun ke depan. Program Strategis dimaksud terdiri atas tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Strategis tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Sementara Program Prioritas yang akan tetap dilaksanakan terdiri atas :

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Pelaksanaan Bantuan Gratis/ Hibah;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
4. Pembentukan Sistem Informasi Terintegrasi.

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih, bahwa Visi Bandar Maritim dimaksud merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, yang ditandai dengan :

1. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT);
4. Terimplementasinya Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari).

A. VISI, MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 adalah :

"Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

a. ***Bandar Maritim*** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

b. ***Kawasan Timur Indonesia*** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Tabel 1.18

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia	Bandar Maritim	Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.
	Kawasan Timur Indonesia	berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi "Bandar Maritim" merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan "Kawasan Pusat Distribusi Logistik"
2. Terbentuknya dasar pembangunan "Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata"
3. Terbentuknya dasar pembangunan "Kawasan Industri Perikanan Terpadu"

Dengan terwujudnya Visi "Bandar Maritim" pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Table 1.19
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

Pernyataan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Misi
1.	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas	Bandar Maritim
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan	Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutaan menuju dimensi peningkatan status desa, dan dimensi peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan menjadi tujuan, dengan sasaran utama Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan, Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	Bandar Maritim
3.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauaan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik	Bandar Maritim
4.	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman	Pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa	Bandar Maritim

Pernyataan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Misi
		kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki	
5.	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah	Bandar Maritim
6.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutaan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi	Bandar Maritim

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauaan Selayar 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, dengan **sasaran** berikut ini :
    a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan **sasaran** berikut ini:
    a) Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan
    b) Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, memiliki **tujuan** pembangunan:

a. Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan **sasaran** berikut ini :
    a) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
    b) Maningkatnya Daya Beli Masyarakat

Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman, dengan **sasaran** berikut ini:
    a) Meningkatnya Usaha Perikanan
    b) Meningkatnya Usaha pariwisata
    c) Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki **tujuan** pembangunan :

a. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya, dengan **sasaran** berikut ini :
    a) Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial.
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan, dengan **sasaran** berikut ini:
    a) Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi-6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki **tujuan** pembangunan:

a. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, dengan **sasaran** berikut ini :
   a) Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Program Pembangunan Daerah sesuai yang telah ditentukan dan diarahkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih terdiri dari dua program besar yakni Program Strategis dan Program Prioritas.

Program Srategis dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim, yang terdiri atas :

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan :

1) Pembangunan Distribusi Logistik (PDL)

Program Strategis Pembangunan Distribusi Logistik (PDL) akan berpusat di Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene dan sekitarnya. Kawasan PDL di Pamatata dan sekitarnya tersebut terdiri dari 3 (tiga) zona pengembangan, masing-masing zona distribusi, zona pelabuhan/ petikemas, dan zona industri. Sementara itu tahapan pengembangan dibagi juga kedalam 3 (tiga) tahapan besar, masing-masing tahapan pembentukan, tahapan pembangunan, dan tahapan pengelolaan.

Setiap tahapan berisi seperangkat kegiatan yang saling mendukung untuk mewujudkan PDL yang pendanaannya terurai selama 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan periodesasi RPJMD ini. Setiap kegiatan dan pendanaan diberikan tanggungjawab kepada masing-masing Perangkat Daerah teknis untuk menganggarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerahnya, mendasari

skenario pembangunan yang telah disusun. Selain itu, pembiayaan dari skenario pembangunan tersebut juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan Swasta/ Badan Usaha.

Secara kewilayahan, Kawasan Pusat Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, akan didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :

a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambar 1.4
Peta Kawasan Pusat Distribusi Logistik Kawasan Timur Indonesia



Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Pusat Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

a. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan Kawasan PDL;
b. Dimulainya pembangunan non fisik PDL;
c. Dimulainya pembangunan prasarana umum (utilitas) kawasan;
d. Dimulainya pengembangan pelabuhan umum;
e. Dimulainya pembangunan pelabuhan peti kemas;

f. Dimulainya pembangunan gudang produksi;
g. Masuknya investasi pada program pembangunan PDL; dan
h. Dimulainya pembangunan Sub Kawasan PDL.

2) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Program Strategis Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata akan dipusatkan di Pulau Pasi Gusung dan Matalalang dengan luasan 7.160.000 m2. Lokasi ini merupakan lokasi yang telah diusulkan ke Dewan KEK Nasional, yang berarti pembangunan dalam lokasi KEK akan dilakukan oleh konsorsium pengusul dan pembangunan di luar lokasi KEK akan dilakukan melalui pendanaan pemerintah dengan dukungan APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

Skenario tersebut berisi seperangkat kegiatan yang saling mendukung untuk mewujudkan KEK yang pendanaannya terurai selama 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan periodesasi RPJMD ini. Setiap kegiatan dan pendanaan diberikan tanggungjawab kepada masing-masing Perangkat Daerah teknis untuk menganggarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerahnya. pembiayaan dari skenario pembangunan tersebut juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan Swasta/ Badan Usaha.

Gambar 1.5

Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata



Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, berupa :

a. Terbentuknya KEK;
b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar/ infrastruktur pendukung di luar kawasan;

3) Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Program Strategis Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) akan berpusat di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu. Kawasan KIPT terdiri dari 5 (lima) zona pengembangan, masing-masing zona pemberdayaan, zona industri ikan hidup, zona distribusi ikan beku, zona industri produk akhir, dan zona industri berbahan baku ikan.

Sementara itu tahapan pengembangan dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan besar, masing-masing tahapan pembentukan, tahapan pembangunan, dan tahapan pengelolaan.

Setiap tahapan berisi seperangkat kegiatan yang saling mendukung untuk mewujudkan KIPT yang pendanaannya terurai selama 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan periodesasi RPJMD ini. Setiap kegiatan dan pendanaan diberikan tanggungjawab kepada masing-masing Perangkat Daerah teknis untuk menganggarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerahnya, mendasari skenario pembangunan yang telah disusun dan disepakati bersama. pembiayaan dari skenario pembangunan tersebut juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan Swasta/ Badan Usaha.

Secara kewilayahan, Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambar 1.6

Peta Kawasan Industri PerikananTerpadu



Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa:

a. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan Kawasan KIPT;
b. Dimulainya pembangunan non fisik KIPT;
c. Dimulainya pembangunan prasarana umum (utilitas) KIPT;
d. Dimulainya pembangunan prasarana pada zona pemberdayaan masyarakat dalam KIPT;
e. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan Hangkoang;
f. Masuknya investasi pada program pembangunan KIPT; dan
g. Dimulainya pembangunan Sub Sentra KIPT.

4) Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penopang atau sebagai penguat dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dalam hal ini nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan Perangkat Daerah yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran adanya desa berstatus mandiri, bertambahnya jumlah desa berstatus maju, dan dikeluarkannya desa yang masih berstatus sangat tertinggal.

Tabel 1.20

Keadaan Status Desa pada Tahun 2020 dan 2026

No.	Status Desa	Keadaan Jumlah Desa 2020	Keadaan Jumlah Desa 2026
1.	Mandiri	0	3
2.	Maju	3	10
3.	Sangat Tertinggal	3	0

Guna mewujudkan peningkatan status desa tersebut ada 3 (tiga) indeks yang harus diperkuat yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan, dengan berbagai macam dimensi dan perangkat indikatornya.

Dimensi dan perangkat indikator inilah yang merupakan seperangkat kegiatan yang saling mendukung untuk mewujudkan peningkatan IDM yang pendanaannya terurai selama 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan periodesasi RPJMD ini. Setiap kegiatan dan pendanaan diberikan tanggungjawab kepada masing-masing Perangkat Daerah teknis untuk menganggarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerahnya.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026 sebagai penekanan yang termaktup pada indikator sasaran RPJMD ini ditandai dengan terbentuknya Desa Mandiri sebanyak 3 desa, Desa Maju sebanyak 10 desa dan desa dengan status desa sangat tertinggal tidak ada lagi, sehingga merupakan kerja-kerja kolektif OPD yang terlibat untuk mewujudkan terbentuknya 3 Desa Mandiri, 10 Desa Maju, dan Desa Sangat Tertinggal menjadi tidak ada lagi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Segenap OPD memberikan dukungan penganggaran program dan kegiatan maupun dari dukungan kebijakan/ regulasi. Desa lainnya tetap akan diintervensi sebagaimana biasa baik dari dukungan anggaran maupun dukungan kebijakan dari semua level mulai pusat, provinsi, kabupaten, dan desa sesuai hasil Musyawarah Desa menuju pada peningkatan pencapaian status desa masing-masing.

Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dipilih masing-masing 5 (lima) desa sasaran untuk pembangunan desa wisata, desa nelayan, desa tani, dan desa koperasi, usaha kecil menengah, melalui parameter sesuai latarbelakang potensi wilayah yang dimiliki masing-masing desa termasuk kesiapan sumberdaya masyarakatnya. Adapun desa-desa yang tercakup dan terpilih sebagai desa pengembangan antara lain :

a. Desa Wisata : Desa Menara Indah, Bontomarannu, Bahuluang, Patilereng, Polassi.
b. Desa Koperasi dan UMKM : Desa Bahuluang, Bontosunggu, Bungaiya, Bontomarannu, Appatanah.
c. Desa Nelayan : Bontosunggu, Bonea, Mekar Indah, Appatanah, Ujung.
d. Desa Tani : Pengembangan Kampong Munte, Desa Maharayya, Onto, Kohala, Lantibongan, Tamalanrea, Bontotangga, Kaburu, Bontolembangan, Batangmata Sapo, Laiyolo Baru. Pengembangan Padi, Desa Ujung, Kembangragi, Bontobulaeng, Bontosaile, Bontomalling, Labuang Pamajang, Lembang Baji, Ma'minasa, Bontobaru, Teluk Kampe. Pengembangan Palawija, Desa Kayuadi, Bonerate, Kalaotoa, Bonea Timur, Lowa. Pengembangan Peternakan, Desa Bungaiya, Binanga Sombaiyya, Nyiur Indah, Tanamala, Sambali, dan Batu Bingkung.

Diharapkan dengan perputaran ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Unggulan Gerbangsari ini, akan dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat desa. Disamping itu sangat diharapkan desa-desa pengembangan tersebut dapat memberikan efek pengganda bagi perkembangan desa-desa lain disekitarnya. Salah satu yang menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah sebagai wujud implementasi program pemanfaatan SDA dan penyelamatan lingkungan khususnya aspek keanekaragaman hayati adalah Pembangunan Kebun Raya Gojang Desa Bontomarannu, yang bertujuan terbangunnya kawasan hutan untuk pelestarian dan terbinanya keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas ekonomi, sosial, budaya, sarana rekreasi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan baik kualitas air, tanah, udara, dan tutupan lahan.

Selanjutnya terkait pembangunan ekonomi desa, ada 5 (lima) indikator pembangunan ekonomi desa yang hendak dituju, masing-masing :

a. Infrastruktur desa yang baik;
b. Fasilitas umum yang memadai;
c. Akses informasi yang merata;
d. Kualitas SDM yang unggul; dan
e. Pendapatan penduduk yang makin meningkat.

Lebih jauh dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan diwujudkan melalui pembangunan desa (wisata, nelayan, tani, dan Koperasi UMKM), mempunyai tujuan masing-masing :

1. Desa pengembangan Wisata, bertujuan :
    a. Penguatan infrastruktur dasar;
    b. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya;
    c. Peyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata;
    d. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata; dan
    e. Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemasaran pariwisata.

2. Desa Pengembangan Nelayan, bertujuan :
    a. Pengalokasian pemberdayaan sumberdaya;
    b. Penguatan kelembagaan;
    c. Penguatan teknologi; dan
    d. Pemberdayaan sumberdaya manusia.
3. Desa Pengembangan Pertanian, bertujuan :
    a. Meningkatkan produksi produk pertanian dan peternakan;
    b. Meningkatkan produktifitas produk pertanian dan peternakan; dan
    c. Meningkatkan daya saing produk pertanian dan peternakan.
4. Desa pengembangan Koperasi dan UMKM, bertujuan :
    a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM;
    b. Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pembentukan produk unggulan daerah, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan ekspor.
    c. Pengembangan akses produksi melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal berbasis sumberdaya lokal.

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya juga diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain hal tersebut, RKPD juga difokuskan pada pencapaian target Visi-Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Sebagai gambaran awal, capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,67

persen, PDRB Perkapita (ADHB) sebesar 53,76 juta rupiah, Tingkat Kemiskinan 12,24 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 1,49 persen, Gini Rasio 0,350 dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,35. Selain capaian indikator makro tersebut, dalam penyusunan RKPD tahun 2024 juga memperhatikan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun KETIGA dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang difokuskan pada peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa, pembangunan infrastruktur pada sub kawasan/ sub sentra pendukung program strategis daerah, peningkatan investasi sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana serta peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Pusat Distribusi Logistik, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu serta terwujudnya Gerakan Membangun Desa Mandiri pada tahun 2026.

RKPD tahun 2024 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16, yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari pendekatan perencanaan yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipati, politis dan top-down bottom-up serta berorientasi pada substansi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Adapun tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah:

1. Menyediakan acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;

2. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
3. Sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024; dan
4. Untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Penjabaran Program Pembangunan sebagaimana ***telampir dalam Laporan ini.***

I.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar pelayananan minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh Karena itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal memperjelas bentuk layanan apa saja yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Layanan layanan tersebut dianggap sebagai layanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan setiap individu. Sasaran akhir SPM dalam kerangka regulasi ini menyasar setiap individu warga negara. Hal ini lebih jauh dipertegas dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Layanan yang diterima oleh masyarakat perlu diberikan batasan minimal sehingga setiap individu masyarakat bisa memiliki ekspektasi minimal terkait apa yang akan disediakan oleh negara. Batasan minimal tersebut dirumuskan dalam bentuk standar mutu yang secara detail dijelaskan dalam peraturan Menteri terkait. Dalam konteks regulasi, seluruh kebutuhan kebijakan untuk penerapan dan

pemenuhan SPM telah diterbitkan. Tahap selanjutnya adalah penerapan pada tingkat pemerintah daerah. Penerapan SPM tentunya akan mengikuti siklus penerapan kebijakan pemerintahan secara umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena :

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan

publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena :

3. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
4. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 134);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 837);

B. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi

pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyusun perencanaan dan pengganggaran penyelenggaraan Pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

C. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah

sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung pencapaian SPM dalam rangka peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu, Program Penyempuranaan Sistem manajemen pelayanan publik dan Program peningkatan kapasitas administrasi pelayanan publik.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk membiayai program/ kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Bidang Sosial.

Adapun Program dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM di Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 21

Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024

No	Bidang Urusan	Nama Program	Perangkat Daerah
1	PENDIDIKAN	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
2	KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

	PENATAAN RUANG	Minum	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARKAT	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	SOSIAL	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	

Selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 juga wajib diperhatikan dalam pengalokasian belanja daerah yang terdiri dari :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga;
b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya unggulan, diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata terhadap perekonomian daerah sehingga dapat menekan angka kemiskinan, dan mempercepat pemulihan ekonomi;
c. Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan merata serta sesuai sistem penataan dan pemanfaatan ruang, yang diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berdasarkan rencana tata ruang;
d. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi sistem pelayanan publik, diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan reformasi birokrasi;
e. Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, diarahkan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tabel 2.1.

Capaian Kinerja Makro

No	Indikator KinerjaMakro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja (%)
1	2	4	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,13	71,98	1,19
2	Angka Kemiskinan	12.27	10,79	-12,06
3	Angka Pengangguran	1.98	2,05	3,53
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.68	3,33	-9,51
5	Pendapatan Per kapita	56.57	58,29	3,04
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.345	0,329	-4,63

Sumber Data : BPS Kepulauan Selayar 2025

II.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	**Pendidikan**					
		1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,97 %	Disdikpora Dan Disdukcapil	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,61 %	Disdikpora Dan Disdukcapil	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	81,60 %	Disdikpora Dan Disdukcapil	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	79,48 %	Disdikpora	
2	**Kesehatan**					
		5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,093 %	Rumah Sakit Umum Daerah	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	Rumah Sakit Umum Daerah	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,48 %	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	Dinas Kesehatan	
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94,03 %	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,23 %	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,16 %	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68,86 %	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,44 %	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	
3	**Pekerjaan Umum**					
		19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	5,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui	43,02 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		Ruang	
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,63 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	116,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	54,58 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10,23 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	**Perumahan Rakyat**					
		28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan dan Kawasan	Tidak terjadi bencana dalam

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Permukiman	skala besar
		29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak ada rumah yang terdampak relokasi program pemerintah
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	76,85 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	36,70 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak ada pengembang yang mengajukan pembangunan PSU
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					
		33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satuan polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	63,63 %	Satuan polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	87,93 %	Satuan polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,35 menit	Satuan polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	**Sosial**					
		40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %	Dinas Sosial	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	Dinas Sosial	

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	**Tenaga Kerja**					
		42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	DPMPTSPTK	
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,021%	DPMPTSPTK	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	29,83	DPMPTSPTK	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100 %	DPMPTSPTK	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	13,8 %	DPMPTSPTK	
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
		47	Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD	79,03 %	DP3AP2KB	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	DP3AP2KB	
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,75 %	DP3AP2KB	
3	**Pangan**					
		50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,16 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4	**Pertanahan**					
		51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan terkait capaian tahun 2024 dari OPD pengampu urusan
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan terkait capaian tahun 2024 dari OPD pengampu

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						urusan
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan terkait capaian tahun 2024 dari OPD pengampu urusan
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan terkait capaian tahun 2024 dari OPD pengampu urusan
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan terkait capaian tahun 2024 dari OPD pengampu urusan
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Surat Keterangan terkait capaian tahun 2024 dari OPD pengampu urusan
5	**Lingkungan Hidup**					
		57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,65	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	20,76 %	Dinas Lingkungan Hidup	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	28,57 %	Dinas Lingkungan Hidup	
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
		60	Perekaman KTP elektronik	94,07 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	52,63 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		62	Kepemilikan akta kelahiran	93,25 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	62,96 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
		64	Persentase pengentasan desa tertinggal	33,33 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	11,11 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
		66	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1	DP3AP2KB	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,35 %	DP3AP2KB	
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,49 %	DP3AP2KB	
9	**Perhubungan**					
		69	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,51	Dinas Perhubungan	
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,28	Dinas Perhubungan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
10	**Komunikasi dan Informatika**					
		71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	70,27 %	Dinskominfo SP	
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	Dinskominfo SP	
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	72,15 %	Dinskominfo SP	
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
		74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	5,40 %	Disperindagkop UKM	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0,44 %	Disperindagkop UKM	
12	**Penanaman Modal**					
		76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-62,69 %	DPMPTSPTK	
13	**Kepemudaan dan Olahraga**					
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	0,33 %	DISDIKPORA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			ekonomi mandiri			
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam -organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,31 %	DISDIKPORA	
		79	Peningkatan prestasi olahraga	24 medali	DISDIKPORA	
14	**Statistik**					
		80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Diskominfo SP	
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Diskominfo SP	
15	**Persandian**					
		82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	74,50 %	Diskominfo SP	
16	**Kebudayaan**					
		83	Terlestarikannya Cagar Budaya	44,73 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
17	**Perpustakaan**					
		84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	82,99 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	95,79 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18	**Kearsipan**					
		86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	57,67 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

B. URUSAN PILIHAN

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	**Kelautan dan Perikanan**					
		88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	98,11 %	Dinas Perikanan	
2	**Pariwisata**					
		89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	141,71 %	Dinas Kepariwisataan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-12,26 %	Dinas Kepariwisataan	
		91	Tingkat hunian akomodasi	4,17	Dinas Kepariwisataan	
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,24 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,49 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	**Pertanian**					
		94	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	0,13 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-8,09 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4	**Kehutanan**			100		Bukan kewenangan Kabupaten
5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**			-		Tidak terdapat sumber panas bumi di Kepulauan Selayar
6	**Perdagangan**					
		97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	13,55 %	Disperindagkop UKM	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Swalayan)			
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	59,89 %	Disperindagkop UKM	
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	58,25 %	Disperindagkop UKM	
7	**Perindustrian**					
		100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	4,58%	Disperindagkop UKM	
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0,375%	Disperindagkop UKM	
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Disperindagkop UKM	Tidak ada pelaku industry yang mengajukan IUI
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Disperindagkop UKM	Tidak ada perusahaan atau masyarakat yang mengajukan IPUI
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan	-	Disperindagkop UKM	Tidak ada Perusahaan yang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota		DPMPTSPTK	mengajukan IUKI & IPKI
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	115	Disperindagkop UKM	
8	**Transmigrasi**			100		Tidak ada Kewenangan Kab/Kota

II.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	**Perencanaan Keuangan**					
		1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	43,55	BPKPD	
		2	Rasio PAD	7,62	BPKPD	
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	Inspektorat Daerah	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	Inspektorat Daerah	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	72,95	BPKPD	
		6	Opini Laporan Keuangan	8	BPKPD	
2	**Pengadaan**					
		7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian ULP Setda	Tidak terdapat proyek konstruksi diatas 50 M
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	42,8	Bagian ULP Setda	
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	88,58	Bagian ULP Setda	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-	Bagian ULP Setda	Belum ada data yang disampaikan dari Bagian
3	**Kepegawaian**					
		11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	74,32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
		12	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	30,79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	**Manajemen Keuangan**					
		14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	12,12	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah	
		15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	19,82	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		16	Manajemen Aset	4	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah	
		17	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,06	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah	
5	**Transparansi dan Partisipasi Publik**					
		18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	74,17	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah	
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

II.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

II.3.1. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasikinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuandan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sangksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Visi : "Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00 (CC)
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50
		2	Nilai Sakip Daerah	65,00 (B)
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,015 (perlu perbaikan)
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Rasio Gini	0,336
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Indeks Desa Membangun	0,6650 (Berkembang)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,33
		2	Tingkat Kemiskinan	10,54
6	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	68,60
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Indeks Pendidikan	54,19
		2	Indeks Kesehatan	68,81
8	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	1	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	9.450.000
9	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman	1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	5,27 – 7,03
		2	PDRB/Kapita	53,50
10	Meningkatnya Usaha Perikanan	1	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	27,00
11	Meningkatnya Usaha Pariwisata	1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	5,59
12	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan	1	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	14,00
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	44,00
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Indeks Ketahanan Sosial	0,7000
15	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan	1	Indeks Kesalehan Sosial	65,15
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Angka kriminalitas	115
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,80 (cukup baik)
18	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	54,00
		2	Indeks Kualitas Udara	85,49
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	45,06

II.3.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar terwujud Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan;
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026. Dimana RPJMD terdapat 6 (enam) misi, 7 (tujuh) tujuan, 11 (sebelas) sasaran dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKTOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Misi 1	1	1	4	Sangat Tinggi = 2 Tinggi = 2
2.	Misi 2	1	2	4	Sangat Tinggi = 3 Sangat Rendah = 1

3.	Misi 3	1	2	4	Sangat Tinggi = 4
4.	Misi 4	1	3	5	Sangat Tinggi = 1 Tinggi = 2 Rendah = 2
5.	Misi 5	2	2	4	Sangat Tinggi = 3 Sangat Rendah = 1
6.	Misi 6	1	1	4	Sangat Tinggi = 4

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	68,00 (B)	60,55	89,04%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00	80,74	107,65%
		2	Nilai Sakip Daerah	70,00 (BB)	61,68 (B)	88,11%
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,943 (perlu perbaikan)	72,3196 (perlu perbaikan)	97,80%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Rasio Gini	0,320	Belum rilis	-
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Indeks Desa Membangun	0,7000 (Berkembang)	0,719 (Berkembang)	102,71%
5	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20	2,05	106,82%
		2	Tingkat Kemiskinan	10,00	10,79	92,1%
6	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	69,00	71,98%	104,32%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Indeks Pendidikan	55,83	63,97%	114,58 %
		2	Indeks Kesehatan	68,99	82,83%	120,06%
8	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	1	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	9.700.000	10.235.000	105,52%
9	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman	1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,50 – 8,00	3,33%	51,23%
		2	PDRB/Kapita	55,00	58,29%	105,98%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
10	Meningkatnya Usaha Perikanan	1	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	28,00	23,83%	85,11%
11	Meningkatnya Usaha Pariwisata	1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	6,41	3,5%	54,60%
12	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan	1	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	15,00	13,57%	90,47%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,00	50	104,17%
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Indeks Ketahanan Sosial	0,7100	0,7694	108,37%
15	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan	1	Indeks Kesalehan Sosial	67,30	77,87	115,71%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Angka kriminalitas	105	389	-170,48%
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,14 (cukup)	67,65	102,28%
18	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	56,00	52,22	93,25%
		2	Indeks Kualitas Udara	85,59	94,56	110,48%
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,56	44,39	93,33%

II.3.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Target kinerja dalam RPJMD sama dengan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan perjanjian kinerja, karena pada dasarnya yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja adalah yang termuat dalam RPJMD.

II.3.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA .

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 18 (delapan belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis 1

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah

Tujuan strategis 1 ini merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Seluruh Perangkat Daerah. Hasil pengukuran perwujudan reformasi birokrasi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00 (CC)	53,3 (CC)	83,28%	68,00 (B)	60,55	89,04%
Rata-rata Capaian Kinerja				83,28%	Rata-rata Capaian Kinerja		89,04%

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar lebih baik. Capaian indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 adalah 55,25 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 hanya sebesar 53,3%, Pada Tahun 2024 realisasi indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan yakni sebesar 60,55% atau naik sebesar 7,25%, hal ini disebabkan beberapa komponen RB General terhadap indikator penilaian mendapatkan skor atau nilai yang cukup tinggi meskipun masih terdapat beberapa catatan atau rekomendasi perbaikan untuk peningkatan indeks ReformasiBirokrasi pada tahun mendatang.

Tabel 2.5.
Perkembangan capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi	42,70	51,24	55,65	53,3	60,55

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peningkatan realisasi capaian dari tahun ke tahun terhadap indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kenaikan secara signifikan meskipun terjadi penurunan di tahun 2023 namun kembali naik di tahun 2024.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks Reformasi Birokrasi adalah :

1. Membangun unit kerja zona integritas
2. Melakukan langkah strategis untuk bisa mendorong peningkatan tata kelola pengadaan
3. Melakukan penyusunan Rencana Aksi SPAMLAPOR
4. Melakukan penyusunan Rencana Aksi terkait pengentasan kemiskinan
5. Mendorong pelaksanaan SKM pada seluruh UPP, dan
6. Perbaikan terhadap komponen-komponen yang menjadi dasar terhadap survei penilaian integritas.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi

pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **"Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh seluruh SKPD. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dan hasil pengukuran peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50	78,00	107,59%	75,00	80,74	107,65%
2	Nilai Sakip Daerah	65,00 (B)	61,02 (B)	93,88%	70,00 (BB)	61,68 (B)	88,11%
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,015 Baik	65,027 Perlu Perbaikan	90,29%	73,943 Perlu Perbaikan	72,3196 Perlu Perbaikan	97,80%
Rata-rata Capaian Kinerja				97,24%	Rata-rata Capaian Kinerja		97,85%

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 80,74 jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2023 yakni 78,00%, maka terjadi kenaikan sebesar 2,74 atau masuk dalam kategori Kinerja Layanan "Baik". hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perangkat daerah yang disurvei melakukan perbaikan layanan meskipun masih ada beberapa perangkat daerah yang masih perlu perbaikan di beberapa unsur layanan juga perlu mempertahankan kinerja positif yang telah dicapai saat ini.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat adalah :

1. Perlunya dilakukan pendampingan kepada beberapa Perangkat Daerah Pelaksana Layanan.

2. Peran aktif dalam hal informasi terhadap Perangkat Daerah terkait batas waktu pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat.
3. Perlunya inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.
4. Perbaikan pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas waktu pelayanan melalui aplikasi dan peningkatan inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan/ ide-ide kreatif yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
5. Pemerintah Daerah perlu melakukan perbaikan terhadap tiga unsur layanan yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur serta kompetensi pelaksana.
6. Kompetensi Pelaksana merupakan salah satu kunci Kualitas Pelayanan, maka perlunya dilaksanakan kegiatan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi layanan.

Nilai Sakip Daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melihat hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2024 sebesar 61,68% dengan predikat "B" terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 60,21 dengan predikat "B". Jika dilihat dari tingkat realisasinya terjadi penurunan disebabkan setiap tahunnya terjadi kenaikan terhadap target capaian tersebut.

Tabel 2.7
Perkembangan capaian Nilai SAKIP Kab. Kep. Selayar
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021 (akhir RPJMD)	Tahun 2022 (awal RPJMD)	Tahun 2023	Tahun 2024
Hasil evaluasi	CC	B	B	B 61,02	B 61,68

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	58,02	60,21	60,49		

Berdasarkan tabel perkembangan capaian nilai SAKIP tersebut, terjadi peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 menunjukkan nilai 61,68 dengan predikat "B", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di dukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023 dari 28 Perangkat Daerah yang dievaluasi terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP predikat BB, 11 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP predikat B, 10 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP predikat CC dan masih terdapat 2 Perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP predikat C.

Telah dilakukan beberapa upaya perbaikan demi meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adapun upaya yang akan dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Kemenpan RB , antara lain :

1. Mengunggah dokumen perencanaan turunan seperti Perjanjian Kinerja tahun berjalan seluruh Perangkat Daerah pada esr.menpan.go.id.
2. Memperbaiki kualitas pohon kinerja/*logical framework* dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu mengidentifikasi critical succes factor yang menggambarkan aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dan dibutuhkan dalam

mewujudkan kinerja utama, kemudian pohon kinerja dimanfaatkan menjadi dasar perumusan *cascading* kinerja hingga ke individu.

3. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan agar sasaran yang digunakan menjadi berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, achievable, relevant and time-bound) dan cukup pada level Pemda maupun Perangkat Daerah.
4. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan sehingga sasaran dan indikator pada Renstra, Perjakin dan IKU menjadi selaras.
5. Memastikan setiap indikator kinerja memiliki definisi operasional, formulasi perhitungan, penanggung jawab, dan sumber data yang relevan dan spesifik terhadap kinerja yang akan dicapai.
6. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi secara berkala.
7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment*.
8. Menyusun Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah yang komprehensif dan memberikan informasi yang memadai sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
9. Mereviu kembali Laporan Kinerja dengan memastikan bahwa target kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berjalan lebih tinggi nilainya daripada realisasi kinerja tahun sebelumnya.
11. Mengunggah Laporan Hasil Evaluasi Internal milik seluruh Perangkat Daerah pada esr.menpan.go.id

12. Inspektorat selaku quality assurance dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat memberikan catatan dan rekomendasi yang mendalam.
13. Melakukan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain:

1. Internal Birokrasi:
   a. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD dengan kegiatan-kegiatan yang *project error*;
   b. Masih rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan;
   c. Masih rendahnya kapasitas fiscal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiscal (*fiscal gap*).
2. Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah:
   a. Belum mampu menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan yang baik, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
   b. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
   c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Adapun alternatif strategi yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur perencana, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang perencanaan;

2. Melaksanakan penyusunan perencanaan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
3. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerja sama dengan SKPD atau pihak yang terkait;
4. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerja sama.
5. Diperlukan adanya koordinasi yang menyeluruh agar pada tahun mendatang target dapat dicapai.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2024 sebesar 72,3196 terjadi kenaikan jika dibandingkan Tahun 2023 yang hanya sebesar 65,027, terjadi kenaikan sebesar 7,2926. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menigkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperbaiki berbagai dimensi yang menjadi indikator penilaian.

Secara keseluruhan, data IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini menggambarkan perjalanan yang penuh tantangan namun juga penuh harapan, Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Beberapa Dimensi pembentuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.
2. Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD menunjukkan konsistensi yang baik dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja mandatori.
3. Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah,

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun dan diserahkan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 29 Februari 2024 oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan pemeriksaan atau diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang nantinya akan diberikan opini BKP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun Faktor yang dilakukan guna peningkatan pencapaian terhadap indikator pada tahun akan datang adalah :

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Adanya upaya seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah masing-masing.
4. Dari sektor pengawasan, inspektorat berperan penting dalam hal pemeriksaan laporan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor yang menghambat peningkatan capaian terhadap indikator tersebut disebabkan masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun solusi yang dilakukan di tahun akan datang adalah :

1. Akan menindaklanjuti kelemahan pada sistem pengendalian intern
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Tujuan Strategis 2

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Tujuan strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **"Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**. Tujuan ini didukung secara terpadu oleh Dinas PUTR, Dinas PMD, Distan KP, DPK, DLH, BPBD, Disdikpora dan Dinkes. Untuk mengukur tujuan kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran pada Tahun 2024. Hasil pengukuran peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Gini	0,336	0,345	102,68%	0,320	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja				102,68%	Rata-rata Capaian Kinerja		-

Rasio Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada pada ketimpangan tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kepulauan selayar pada tahun 2023 yang diukur oleh Rasio Gini adalah 0,345, menurun 0,05 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar, 0,350. Ketimpangan pendapatan/pengeluaran yang direfleksikan dengan angka Gini Ratio untuk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 0,345 dan termasuk ketimpangan sedang. Artinya semakin mendekati "Satu" maka dikatakan ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna, sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan

sempurna, sementara data capaian untuk indikator Rasio Gini sampai saat ini belum rilis dari Badan Pusat Statistik tahun 2024.

Perhitungan indeks Gini pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih melalui pendekatan pengeluaran, hal ini disebabkan masih terbatasnya informasi yang didapat disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak ingin mempublikasikan penghasilannya.

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan belum tercapainya target yaitu :

4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha terutama pada sektor lapangan usaha unggulan yang menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
5. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (12,27%)
7. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang signifikan yang tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan yang signifikan
8. Pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan dan pariwisata belum optimal

Berikut beberapa upaya yang dilakukan guna mengatasi pencapaian target, yaitu :

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah melalui hilirisasi dan investasi pada sektor pariwisata, kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan peranan sektor-sektor dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat.

3. Diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata dan kelancaran arus barang dan orang.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **102,71%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Desa Membangun	0,6650 (Berkembang)	0,6953	104,56	0,7000 (Maju)	0,719	102,71
Rata-rata Capaian Kinerja				104,56%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,71%

Realisasi capaian Indeks Desa Membangun pada Tahun 2023 sebesar 0,6953% terjadi peningkatan bila dilihat dari target yang ditentukan sebesar 0,6650% dengan sebutan "berkembang", jika dibandingkan dengan target capaian pada Tahun 2022, Indeks Desa Membangun sebesar 0,6670% dengan sebutan "berkembang".

Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun melibatkan beberapa

Perangkat Daerah, Adapun upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian peningkatan Indeks Desa Membangun adalah :

1. Identifikasi IDM yang akan menaikkan indeks
2. Memetakan hasil identifikasi yang akan dinaikkan indeksnya agar rekomendasi dapat dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan lokal desa
3. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait setelah hasil pemetaan didapatkan dengan tujuan agar Perangkat daerah dapat mengintervensi rekomendasi IDM tersebut.
4. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Multi Stakeholder (Tenaga Ahli, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa) agar pemetaan rekomendasi IDM dapat dimaksimalkan dalam bentuk kegiatan di Perangkat Daerah dan Desa.

Peningkatan status desa pada tahun 2024 diketahui terjadi peningkatan secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

3. Status Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2024 sudah tidak ada
4. Status Desa Tertinggal pada tahun 2023 sebanyak 12 desa, terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 6 desa
5. Status Desa Berkembang pada tahun 2024 sebesar 36 desa, pada tahun sebelumnya, jumlah desa berkembang sebanyak 42 desa, terdapat 2 desa tertinggal yang meningkat statusnya, dari tertinggal ke berkembang dan terdapat 4 desa berkembang yang meningkat statusnya menjadi desa maju dan desa mandiri.
6. Status Desa Maju pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yakni sebesar 17 desa dikarenakan 4 desa maju di tahun 2023 diantaranya meningkat statusnya menjadi desa mandiri, serta terdapat tambahan 4 desa baru dengan status berkembang di tahun 2023 menjadi desa maju di tahun 2024.
7. Status Desa Mandiri pada tahun 2024 melampaui target, dimana untuk tahun ke empat periode RPJMD ditargetkan 6 desa mandiri, namun dengan adanya program gerbangsari, untuk saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar, desa mandiri meningkat menjadi 22 desa.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-20216 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **99,46%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kemiskinan	10,54	12,27	116,41%	10,00	10,79	92,10%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,33	1,98	248,02%	2,20	2,05	106,82%
Rata-rata Capaian Kinerja				182,22%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,46%

1. Tingkat Kemiskinan

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 sebesar 10,79%, terjadi penurunan sebesar 1,48% poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 12,27%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Maret 2024 sebesar 14,94 ribu jiwa, turun sebanyak 1.950 jiwa terhadap Maret 2023.

Berdasarkan data BPS, total penduduk pada tahun 2024 berjumlah 142,46 ribu jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk miskin di kabupaten kepulauan selayar pada Maret 2024 sebesar 14,94 ribu jiwa, jumlah tersebut turun 1.950 jiwa terhadap Maret 2023 (16,89 ribu jiwa) dan menurun 1.800 jiwa terhadap Maret 2022 (16,74 ribu jiwa).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan, diantaranya seperti :

8. Pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan terbukanya Lapangan Kerja Baru
9. Penyaluran bantuan yanag tepat sasaran
10. Terjadi peningkatan terhadap pedapatan masyarakat, dan
11. Penurunan beban pengeluaran masyarakat

Jika dilihat dari target awal RPJMD maka persentase penduduk miskin mengalami penurunan dengan target awal sebesar 11,34. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah :

1. Setiap tahun dilakukan update data keluarga miskin agar penanganan kemiskinan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
2. Melalui Dinas Sosial dilakukan beberapa kegiatan antara lain :
   - Pemberian santunan hidup terhadap lanjut usia non potensial/ jompo terlantar, penyadang disabilitas dan anak yatim piatu.
   - Program nasional berupa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional
   - Program keluarga Harapan (PKH)
   - Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT Bantuan Pangan Non Tunai
   - Bantuan Langsung Tunai - Bahan Bakar Mintak (BLT - BBM)
3. Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan bantuan penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang sampai dengan tahun 2024 sudah tertangani sebanyak 22.599 unit.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memberikan bantuan Peralatan yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa bantuan Pengadaan perlengkapan/aksesoris rias pengantin sebanyak 130 unit, Pengadaan rental komputer sebanyak 4 unit, Pengadaan pertukangan sebanyak 18 unit, Pengadaan perbengkelan sebanyak 10 unit, Pengadaan air kemasan 2 layer sebanyak 1 unit, Pengadaan mesin-mesin parut kelapa komplit sebanyak 2 unit.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, biasanya hal tersebut didapatkan pada masyarakat khususnya lulusan baru perguruan tinggi.

Realisasi indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 adalah sebesar 2,05 persen terjadi penurunan sebesar 0,07 persen jika dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang sebesar 1,98 persen.

Angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 74,97 orang turun 4.087 orang dibanding Agustus 2023. Sejalan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan sebesar 4,65 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (2,09 persen poin), sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor Manufaktor (-3,61 persen poin).

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka adalah :

1. Ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan
2. Minimnya pengalaman dari pencari kerja
3. Perubahan Industri
4. Kondisi ekonomi yang terjadi, dan
5. Isu diskriminasi

Beberapa upaya untuk mengatasi pengangguran terbuka diantaranya sebagai berikut :

1. Mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan peluang kerja baru.
2. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru.
4. Memperluas kesempatan kerja di sektor informal.

5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja.
6. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pengangguran.

Tujuan Strategis 3

Meningkatkan fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusi

Tujuan strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"**. Untuk mengukur tujuan ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator tujuan dengan capaian kinerja tujuan pada Tahun 2024 adalah sebesar **104,32%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi.** Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hasil pengukuran peningkatan fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 3

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,60	71,13	103,69	69,00	71,98	104,32
Rata-rata Capaian Kinerja				103,69%	Rata-rata Capaian Kinerja		104,32%

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup

sebagai ukuran kualitas hidup , IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mencapai 71,98 naik 0,85 poin di bandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 71,13. IPM Kabupaten Kepulauan Selayar rata-rata tumbuh secara signifikan setiap tahunnya. Peningkatan IPM 2024 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini sejalan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Pada dimensi pendidikan, pada tahun 2024 penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau dapat menjalani pendidikan formal selama 12,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma 1. Angka ini menurun 0,07 % dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,69 tahun. Sementara, rata-rata lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,14 % dari 8,35 tahun menjadi 8,49 tahun pada tahun 2024.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bagi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,48 tahun atau lebih lama 0,21 poin dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk mengukur sasaran keempat ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan

rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **117,32%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan	54,19%	63,08%	116,41%	55,83	63,97	114,58%
2	Indeks Kesehatan	81,95%	68,81%	83,96%	68,99	82,83	120,06%
Rata-rata Capaian Kinerja				100,19%	Rata-rata Capaian Kinerja		117,32%

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM.

Berdasarkan data statistik, Indeks Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 63,97% terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan indeks pendidikan tahun 2023 yang hanya sebesar 63,08%.

Beberapa upaya yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pendidikan adalah :

1. Memberikan motivasi dan dorongan bagi orangtua dan siswa akan pentingnya pendidikan dasar 9 tahun.
2. Dari segi tenaga pengajar (guru) di tunjang dengan penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
3. Memberikan peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi pendidikan bagi tenaga pendidik.
4. Pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga siswa sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan hidup lebih tenang tanpa ada gangguan.

5. Dari segi kesehatan diperlukan partisipasi tenaga medis dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa.

2. Indeks Kesehatan

Realisasi indikator kinerja terhadap indeks kesehatan tahun 2024 sebesar 82,83%, naik 7,39%, jika dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 75,44%. Jika Indeks Kesehatan Masyarakat terjadi kenaikan dari target yang telah ditentukan maka derajat kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih perlu perhatian khusus. Hal ini menjadi tugas Dinas Kesehatan untuk perbaikan peningkatan pada tahun akan datang.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal peningkatan capaian dan realisasi kegiatan di bidang kesehatan antara lain:

1. Menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas;
2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang upaya pemeliharaan kesehatan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang maksimal.
4. Membentuk Kader disetiap Desa untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indeks kesehatan antara lain ;

- Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya Usia harapan Hidup
- Pelaksanaan aktifkan posyandu dan vaksinasi bersama mitra/kelompok masyarakat.
- Pelaksanaan upaya deteksi dini
- Kampanye PHBS, Germas dan Program kesehatan lainnya.
- Adanya layanan upaya berhenti merokok (UBM)

- Penyebar luasan media informasi kesehatan melalui media promosi kesehatan
- Adanya dukungan dana dari berbagai sumber anggaran (APBD dan DAK Non Fisik).

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, . Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **105,52%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi** Hasil pengukuran peningkatan daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengeluaran perkapita yang disetarakan	9.450.000	9.830.000	104,02	9.700.000	10.235.000	105,52 %
Rata-rata Capaian Kinerja				104,02 %	Rata-rata Capaian Kinerja		105,52 %

1. Pengeluaran Perkapita yang disetarakan

Pada tahun 2024 pengeluaran perkapita yang disetarakan mencapai 10.235.000 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 9.830.000 atau 0,96 %. Dengan rata-rata capaian pada tahun 2024 yakni 105,52%. Hal ini berarti pengeluaran rata-rata rumah tangga yang ada di Kepulauan Selayar meningkat.

Pengeluaran Rumah tangga memberi sumbangsi besar dalam peningkatan pengeluaran perkapita. Rumah tangga merupakan

konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Tujuan Strategis 4

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman

Tujuan strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2022 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Untuk mengukur tujuan keempat ini terdapat 2 (dua) indikator tujuan sasaran yang didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikana. Untuk mengukur tujuan keempat ini terdapat 2 (dua) indikator tujuan dengan capaian kinerja tujuan pada Tahun 2024 adalah sebesar **78,61%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran tujuan optimalisasi pemanfaatan potensi kemaritiman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 4

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	5,27 – 7,03	3,67%	60,92%	6,50-8,00	3,33%	51,23%
2	PDRB /kapita	53,50	56,57%	105,74%	55,00	58,29%	105,98%
Rata-rata Capaian Kinerja				83,33%	Rata-rata Capaian Kinerja		78,61%

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data Rilis BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sepanjang tahun 2024 terhadap Tahun 2023 tumbuh sebesar 3.33%, capaian ini sedikit melambat jika dibandingkan tahun 2023

sebesar 3,67 %. Pada periode yang sama, ekonomi nasional tumbuh 5,03%, sementara ekonomi sulawesi selatan tumbuh 5,02%.

Pertumbuhan terjadi pada sektor jasa lainnya yang memiliki kontribusi terbesar yakni 11,72% terhadap perekonomian Kepulauan Selayar, sektor industri pengolahan tumbuh 8,60%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 9,31% sementara administrasi pemerintahan, pertahanan dan sosial wajib tumbuh 8,06%.

Tabel 3.12.1
Perkembangan capaian Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kep. Selayar
Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	-1,78%	4,02%	3,67%	3,67%	3,33%

Berdasarkan tabel perkembangan capaian nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan tumbuh melambat di setiap tahunnya.

2. PDRB/kapita

Pendapatan perkapita penduduk (income perkapita) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian antara pendapatan Daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 Income perkapita penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 58,29 juta,- sedangkan Tahun 2023 sebesar 56,57 juta,-. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk Kabupaten

Kepulauan selayar setiap tahunnya. Income perkapita penduduk sering diring digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah; semakin besar Income perkapita penduduknya maka semakin makmur daerah tersebut. Adapun pencapaian indikator tersebut di dukung oleh:

1. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan perkapita melalui berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain senantiasa meningkatkan koordinasi baik di tingkat kecamatan, sidak ke pasar, toko dan gudang sembako yang ada, kemudian peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM, gas LPG.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang mana penunjang utamanya adalah konsumsi rumah tangga disamping konsumsi makanan dan minuman, kesehatan, transportasi, komunikasi dll.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Usaha Perikanan

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa OPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **85,11%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan usaha perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi sektor perikanan	27,00%	27,09%	100,33%	28,00	23,83%	85,11%

	terhadap PDRB						
Rata-rata Capaian Kinerja				100,33%	Rata-rata Capaian Kinerja		85,11%

Realisasi Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 23,83% jika dilihat realisasi tahun 2023 yakni 27,09% maka terjadi penurunan terhadap realisasi presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

Adapun upaya – upaya yang dilakukan agar laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan lebih meningkat dan stabil dengan menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan melalui kegiatan penguatan sarana prasarana produksi, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan penguatan kapasitas dan pemebrdayaan kelompok

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Usaha Pariwisata

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa OPD yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **54,60%** dengan kategori predikat **Rendah**. Hasil pengukuran Peningkatan usaha pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi PAD	5,59%	3,39%	60,64%	6,41%	3,5%	54,60%

	sektor Pariwisata terhadap PAD						
Rata-rata Capaian Kinerja				60,64%	Rata-rata Capaian Kinerja		54,60%

Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD

Salah satu sumber potensial PAD adalah sektor Pariwisata, Keberadaan obyek wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan alam dan lingkungan serta memupuk rasa cinta tanah air.

Realisasi capaian terhadap presentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2024 sebesar 3,5% terjadi kenaikan realisasi capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,39%. Realisasi capaian tersebut masih jauh dari target yang ditentukan.

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah :

1. Belum maksimalnya pengelolaan tempat destinasi dengan baik
2. Belum adanya bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bumdes Bontomarannu terkait pengelolaan Puncak tanadoang.
3. Akses menuju lokasi destinasi masih kurang baik
4. Fasilitas daya tarik wisata masih kurang baik
5. Masyarakat kurang aktif dalam membantu pengembangan pariwasata.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya penuh dalam meningkatkan PAD melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adapun upaya yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama antara para pelaku wisata
2. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya.
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan
4. Pengembangan pariwisata pada masyarakat khususnya yang berada dekat dengan lokasi tempat rekreasi.

5. Mengembangkan Daya tarik dan destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Meningkatkan pemasaran pariwisata, dan
7. Mengembangkan SDM dan Ekonomi kreatif.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **90,47%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan usaha industri, transportasi dan perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	14%	13,25	94,64%	15%	13,57	90,47%
Rata-rata Capaian Kinerja				94,64%	Rata-rata Capaian Kinerja		90,47%

Realisasi terhadap indikator presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 13,57% terjadi kenaikan jika dibandingkan realisasi tahun 2023 yang hanya sebesar 13,25 persen.

Peningkatan sektor transportasi disebabkan adanya perbaikan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Kepulauan Selayar terutama pada pelayanan parkir ditepi jalan dan kawasan kuliner, penyediaan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan serta layanan perizinan seperti penerbitan rekomendasi penutupan jalan dan rekomendasi pemuatan BBM untuk kapal laut motor yang menuju kewilayah kepulauan serta layanan sarana dan prasarana seperti pada terminal benteng dan fasilitas darat pada pelabuhan pamatata.

Untuk meningkatkan sektor perdagangan di Kabupaten Kepulauan Selayar maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan adanya investasi. Dengan dilakukannya investasi pada sektor perdagangan maka diharapkan sektor perdagangan dapat berkembang lebih baik lagi di masa akan datang.

Faktor penyebab sehingga tidak tercapainya target dari sektor perdagangan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Belum tersebarnya investasi pada master plan pengemban investasi di kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Sektor /lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menananmkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan.
3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara rutin
4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian LKPM yang bersifat memaksa.

Beberapa solusi dari sektor perdagangan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan usaha kecil dan menengah yaitu :

1. Melakukan peningkatan sarana distribusi perdagangan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) di seluruh kecamatan dengan memastikan seluruh sarana perdagangan yang telah dibangun telah dipergunakan.

Tujuan Strategis 5

Meningkatkan Aktualisasi nilai budaya

Tujuan strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil pengukuran peningkatan aktualisasi nilai budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	44	79	179,55%	48	50	104,17%
Rata-rata Capaian Kinerja				179,55%	Rata-rata Capaian Kinerja		104,17%

Realisasi terhadap indeks pembangunan kebudayaan pada tahun 2024 sebesar 50%, terjadi penurunan jika dilihat dari capaian realisasi tahun 2023 yang sebesar 79%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan salah satu instrumen yang didesain untuk melihat sinergitas kontribusi unsur kebudayaan dalam mendukung pembangunan.

Pembinaan warisan budaya benda dan tak benda harus dilakukan agar kebudayaan daerah di Kepulauan Selayar tetap lestari dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, minimal ada yang dapat dilihat oleh anak cucu dikemudian hari karena masih tersimpan dan terawat utuh dalam bentuk dokumen, gambar, benda atau manuskrip kuno.

Kekayaan budaya Indonesia sesungguhnya luar biasa, namun sayang belum terkelola dengan baik, begitu pula dengan kekayaan budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan diperlukan :

1. Pembinaan warisan budaya benda dan tan benda agar kebudayaan daerah di Kepulauan Selayar tetap lestari dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.
2. Diperlukan pengawasan cagar alam dan cagar budaya.
3. Pemeliharaan cagar budaya agar tetap terjaga keasliannya.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya upaya pelestrian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur tujuan kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **108,36%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Sosial	0,7000	0,7592	108,46	0,7100	0,7694	108,36%
Rata-rata Capaian Kinerja				108,46%	Rata-rata Capaian Kinerja		108,36%

Realisasi indeks ketahanan sosial pada tahun 2024 sebesar 0,7694 terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,7592, hal ini disebabkan target yang ditentukan pada tahun 2023 lebih besar dari tahun sebelumnya. Kenaikan indeks ketahanan sosial dipengaruhi oleh beberapa dimensi diantaranya dimensi modal sosial, dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial yaitu :

1. Toleransi tinggi terhadap suku, ras dan agama.
2. Aman dalam beribadah.
3. Terpenuhinya kebutuhan dari sandang, pangan dan papan.
4. Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, PKM ataupun Pustu.
5. Keinginan masyarakat untuk berobat di layanan kesehatan seperti Rumah Sakit, PKM maupun Pustu.
6. Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk berobat dengan layanan jaminan kesehatan seperti KIS, BPJS Kesehatan.
7. Pemerintah menyediakan sekolah baik tingkat dasar dan menengah, mulai dari kecamatan daratan yang dapat dijangkau hingga kecamatan kepulauan yang sulit dijangkau.
8. Pemerintah memudahkan perizinan pembukaan lembaga pendidikan non formal, seperti pusat bimbingan belajar, les bahasa inggris dan lainnya.

Tujuan Strategis 6

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan keagamaan

Tujuan strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik. Untuk mengukur tujuan keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-

rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **115,71%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kesalehan Sosial	65,15	76,87	117,99	67,30	77,87	115,71
Rata-rata Capaian Kinerja				117,99%	Rata-rata Capaian Kinerja		115,71%

Indeks Kesalehan Sosial

Hasil perhitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 sebesar 77,87 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2023 yang hanya sebesar 76,87, mengalami kenaikan sebesar 1,00 poin.

Terdapat 5 dimensi pembentuk IKS yaitu :

1. Solidaritas Sosial = 65,62%
2. Kerjasama/ mutualitas = 66,32%
3. Toleransi = 87,81%
4. Keadilan = 84,03%
5. Ketertiban Umum (stabilitas) = 85,55

Secara umum, tingkat Kesalehan Sosial masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik berdasarkan skor atau nilai pada masing-masing dimensi, dari lima dimensi pembentuk IKS, dimensi Toleransi mencatat skor tertinggi (87,81) hal ini menunjukkan sikap masyarakat yang menghargai keberagaman dan kebersamaan, sebaliknya dimensi solidaritas sosial (65,62) dan kerjasama/ mutualitas (66,32) memperoleh skor terendah yang mengindikasikan masih perlunya penguatan nilai-nilai kebersamaan dan kontribusi kolektif.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial adalah :

1. Memaksimalkan program/ kegiatan seperti program sikamaseang (satu menanggung satu), fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat, program berbagi berbasis lingkungan setempat dan program sedekah jumat untuk meningkatkan dimensi sosial dan kerjasama.
2. Peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam menjaga dan mengembangkan kerifan lokal masyarakat selayar, seperti annyorong lopi, angngangka sapo, akrera, aklampareng dan akmuhakka.
3. Mendorong dan memberdayakan lembaga keagamaan seperti, masjid, musholah, majelis taklim, dll untuk menjadi pusat pembinaan kesalehan sosial.
4. Meningkatkan kualitas data dan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan kesalehan sosial didaerah, serta mengidentifikasi masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. Untuk mengukur sasaran kesepuluh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **-170,48%** dengan kategori predikat **Sangat Kurang**. Hasil pengukuran peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kriminalitas	115 kasus	237 kasus	-6,087%	105 kasus	389 kasus	-170,48%
Rata-rata Capaian Kinerja				-6,087%	Rata-rata Capaian Kinerja		-170,48%

Realisasi capaian pada tahun 2022 terhadap kasus kriminalitas adalah sebanyak 203 kasus, sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus kriminalitas meningkat menjadi 237 kasus, jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan tingkat kejahatan sebanyak 389 kasus, berdasarkan jumlah tersebut perilaku kriminalitas yang paling banyak terjadi di Kecaman Benteng. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, selain itu pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku belum optimal sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar hukum, baik pelanggaran berat maupun ringan.

Upaya yang dilakukan agar tindak kriminalitas berkurang/diminimalisir yaitu :

1. Melakukan trantibum secara rutin
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan trantibum
3. Menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan poskamling/ronda

Tabel 3.19.1
Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024
Data Angka Kriminal per Kecamatan

No	KEPOLISIAN SEKTOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasimarannu	-	9	3	4	2
2	Pasilambena	-	-	-	9	-
3	Pasimasunggu	5	7	7	10	5
4	Takabonerate	-	4	7	10	2
5	Pasimasunggu Timur	-	-	-	-	-
6	Bontosikuyu	2	9	11	12	19

7	Bontoharu	1	-	-	-	-
8	Benteng	133	153	273	310	315
9	Bontomanai	1	-	5	5	16
10	Bontomatene	4	3	11	7	29
11	Buki	-	-	-	-	1
	JUMLAH	**146**	**185**	**317**	**367**	**389**

Sumber: Selayar dalam angka Tahun 2025 (Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar)

Tujuan Strategis 7

Meningkatkan Pelestarian lingkungan hidup

Tujuan strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk mengukur tujuan ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **102,28%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,80 cukup baik	64,25 sedang	99,15	66,14 Cukup baik	67,65	102,28
Rata-rata Capaian Kinerja				99,15%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,28%

Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 sebesar 67,65 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2023 sebesar 64,25. Dengan kata lain Indeks kualitas lingkungan hidup daerah di kabupaten kepulauan selayar termasuk kategori "Sedang" atau tergolong baik.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup daerah antara lain :

1. Diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti patroli air.
2. Melakukan koordinasi antar pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
3. Peningkatan peran dunia usaha untuk melaksanakan pengelolaan air limbah.
4. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL dan USK.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kajian lingkungan hidup strategis.
6. Meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 11

Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **99,02%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Air	54,00	51,18	94,78	56,00	52,22	93,25%
2	Indeks Kualitas Udara	85,49	90,71	106,11	85,59	94,56	110.48%
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	45,06	37,76	83,79	47,56	44,39	93,33%
Rata-rata Capaian Kinerja				94,89%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,02%

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air pada Tahun 2024 berada pada angka 52,22 dari target yang direncanakan sebesar 56,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,25%, terjadi kenaikan sebesar 1,04% jika dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar 51,18%. Indeks Kualitas Air jika dibandingkan dengan IKA tingkat provinsi dan pusat maka IKA Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam kategori Cukup Baik.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indeks kualitas air pada tahun berikutnya maka dilakukan upaya sebagai berikut :

a. Penambahan frekuensi pemantauan dengan lokasi pemantauan yang mewakili kondisi tercemar, agak tercemar dan tidak tercemar.
b. Waktu pemantauan juga mewakili musim kemarau dan penghujan sehingga diperoleh data yang berbeda karena kemampuan air sungai untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk ke badan sungai.
c. Perlu pengendalian pencemaran melalui edukasi dan peran aktif masyarakat melalui penggunaan bahan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar.
d. Pemulihan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi).
e. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai perizinan yang telah ditetapkan

f. Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domesik dan Usaha Skala Kecil (USK).
g. Perlunya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah cair rumah tangga melalui IPAL komunal.
h. Penegakan hukum terhadap industri-industri sepanjang sungai yang belum mempunyai IPAL.
i. Mendorong dunia usaha untuk peduli melalui CSR dan mendorong pelaksanaan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian LH.
j. Perlu sosialisasi yang secara terus menerus kepada publik tentang pentingnya menjaga kualitas air melalui kampanye dan gerakan hemat air.
k. Mencegah aliran air permukaan (*run off*) langsung ke sungai dan laut.

2. Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2024 sebesar 94,56 persen, terjadi peningkatan sebesar 3,85 % dibandingkan tahun 2023 yakni 90,71%, hal ini menunjukkan indeks kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong baik.

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemaran utama yaitu oksidan /ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (Co), sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Namun saat ini perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO2 dan SO2.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan di tahun akan datang yaitu :

1. Penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara melalui penyusunan inventarisasi emisi untuk mengetahui pemetaan dan roadmap sumber-sumber emisi dan beban emisi
2. Pengendalian sumber-sumber emisi yang berasal dari:
   b. Sumber bergerak:
      - Manajemen transportasi dan peningkatan transportasi massal
      - Kegiatan uji emisi secara berkala

- Peningkatan biaya parkir
- Perda terkait kendaraan bermotor
- Pembatasan usia dan jenis kendaraan di area tertentu
- Hari bebas kendaraan bermotor

c. Sumber tidak bergerak:

- Penaatan baku mutu industri
- Pengawasan implementasi izin lingkungan dan pembinaan perizinan lingkungan

3. Pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu dan manual
4. Upaya lainnya:
   a. Penanganan kebarakan hutan dan lahan
   b. Penyediaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   c. Penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda yang aman dan nyaman
   d. Peraturan terkait kawasan bebas asap rokok (KTR) dan
   e. Penggunaan energi ramah lingkungan

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran kualitas udara adalah:

1. Kawasan Industri (PLTD Tangkak) yang menggunakan diesel dengan solar sebagai bahan bakar sehingga kandungan SO2 besar dan lebih tinggi dari NO2.
2. Kawasan perkantoran, kandungan SO2 lebih tinggi dari NO2 dikarenakan tepat disamping kawasan tersebut merupakan akses keluar masuk truk ke pertambangan dengan aktivitas pengangkutan yang tinggi, juga ruas jalan di depan kawasan perkantoran juga merupakan jalur untuk kendaraan truk dan kendaraan besar lainnya.
3. Kawasan permukiman khususnya jalan sudirman, kandungan SO2 hampir sama tinggi dengan No2. Hal ini dapat terjadi karena merupakan titik ramai lalu lintas dengan 5 arah lalu lintas, tanpa lampu merah dan merupakan batas kendaraan besar seperti truk untuk tidak masuk ke kota sehingga hal ini membuat lalu lintas padat sehingga terjadi peningkatan emisi gas buang kendaraan.

4. Kandungan SO2 besar dan lebih tinggi dari NO2 pada kawasan transportasi khususnya terminal benteng, hal ini dikarenakan angkutan penumpang yang menggunakan solar lebih banyak dibandingkan dengan bensin dan umur kendaraan banyak di atas lima tahun.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Realisasi indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2024 sebesar 44,39 terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 37,76. Hal ini menunjukkan indeks tutupan lahan kabupaten kepulauan selayar masih tergolong kurang baik. Untuk mencapai target pencapaian tersebut maka diperlukan inventarisasi data ruang terbuka hijau (RTH) secara menyeluruh sebagai salah satu indikator yang disyaratkan dalam IKL.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan IKL dengan meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka, juga meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi yang dilaksanakan di 10 Kecamatan, yang mana pelaksanaannya dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya multi purpose treespecies (MPTS).

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 25 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada rincian realisasi anggaran berikut ini:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	40.000.000	37.874.300	94,69%
2	Meningkatnya kepercayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	533.000.000	522.048.875	97,94%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
	masyarakat terhadap pelayanan	Nilai Sakip Daerah	7.000.000	6.387.200	91,25%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	155.315.086.242	145.741.959.016	93,84%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	8.746.292.700	6.740.833.275	77,07%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	1.430.000.000	1.421.964.800	99,44%
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	880.202.000	837.554.100	95,15%
		Tingkat Kemiskinan	2.775.980.000	2.743.765.100	98,84%
6	Meningkatkan fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	907.071.300	879.250.275	96,93%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	92.849.985.680	86.611.893.850	93,28%
		Indeks Kesehatan	83.696.759.088	68.272.403.262	81,57%
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	3.990.805.800	3.955.214.500	99,11%
9	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	2.329.160.500	2.310.842.464	99,21%
		PDRB/Kapita	818.097.000	655.569.608	80,13%
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3.166.405.200	3.115.940.135	98,41%
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	2.648.124.800	2.630.587.803	99,34%
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	1.738.384.500	1.479.396.455	85,10%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	888.861.800	883.988.082	99,45%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan sosial	375.858.300	369.108.700	98,20%
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	350.000.000	344.412.675	98,40%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	1.055.032.700	1.034.787.188	98,08%
17	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	6.305.157.300	6.274.793.844	99,52%
18	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	1.049.643.900	1.037.506.815	98,84%
		Indeks Kualitas Udara	1.558.416.800	1.549.399.460	99,42%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	3.697.096.600	3.687.887.569	99,75%

II.3.5. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Tingkat efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, sedangkan efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang maksimum. Berikut ini perbandingan antara tingkat efektifitas dan efisiensi sumber daya terhadap perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) sasaran.

Tabel 3.23
Tingkat Efektivitas sumber daya Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	98,84%	89,04%	-9,8%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,94%	107,65%	9,71%
		Nilai Sakip Daerah	91,25%	88,11%	-3,14%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	93,84%	97,80%	3,96%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	77,07%	-%	%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	99,44%	102,71%	3,27%
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	95,15%	106,82%	11,67%
		Tingkat Kemiskinan	98,84%	92,10%	-6,74%
6	Meningkatkan fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	96,93%	104,32%	7,39%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	93,28%	114,58%	21,3%
		Indeks Kesehatan	81,57%	120,06%	38,49%
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	99,11%	105,52%	6,41%
9	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	99,21%	51,23%	-47,98%
		PDRB/Kapita	80,13%	105,98%	25,85%
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	98,41%	85,11%	-13,3%
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	99,34%	54,60%	-44,74%
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	85,10%	90,47%	5,37%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	99,45%	104,17%	4,72%
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan sosial	98,20%	108,36%	10,16%
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	98,40%	115,71%	17,31%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	98,08%	-170,48%	-268,56%
17	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	99,52%	102,28%	2,76%
18	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	98,84%	93,25%	-5,59%
		Indeks Kualitas Udara	99,42%	110,48%	11,06%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	99,75%	93,33%	-6,42%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 25 (dua puluh lima) sasaran dan yang diperjanjikan dalam RPJMD, terdapat 15 (lima belas) sasaran dengan tingkat efisiensi cukup baik dengan rata-rata capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 11,96%. Selain itu terdapat 10 sasaran dengan tingkat efisiensi kurang baik. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan hubungan antara sasaran, indikator kinerja dengan program yang mendukung pencapaian indikator tersebut serta OPD penanggung jawab.

Tabel 3.24
Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU dan Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah,
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda
		Nilai Sakip Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Sekretariat Daerah,
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program pengelolaan keuangan daerah 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Program penelitian dan pengembangan daerah	Inspektorat, BPKPD, Bappelitbangda
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	1. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 2. Program pembinaan perpustakaan 3. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia kesehatan	Distan KP, DPK, Disdikpora, Dinkes
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	1. Program Administrasi Pemerintahan 4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemerintahan dan Desa
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitasi Perekonomian Perdesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Program penempatan tenaga kerja	Disperinaker
		Tingkat Kemiskinan	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos
6	Meningkatnya Fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 2. Program penelitian dan pengembangan daerah	Bappelitbangda

7	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidikan dan tenaga kependidikan	Disdikpora
		Indeks Kesehatan	1. Program pemenuhan upaya-upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia Kesehatan 2. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinkes
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita yang disetarakan	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Stabilitasi harga barang kebutuhan pokok barang penting 3. Pengembangan Ekspor 4. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 5. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi 6. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi 3. Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikra (UMKM)	Disdag KUKM
9	Mengoptimalkan pemanfaatn potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 7.	Setda
		PDRB/kapita	1. *Program promosi penanaman modal* 2. *Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal* 3. *Program pelayanan penanaman modal* 2. *Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal*	Dinas PMPTSP
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	1. Program pengelolaan perikanan tangkap 2. Program pengelolaan perikanan budidaya 3. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan *1.* Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif 4. Pengembangan Kebudayaan 5. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

			4. Pengeloaan permuseuman	
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 2. Program pengelolaan pelayaran 3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas Perhubungan Dinas PMPTSP
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	4. Program pengembangan kebudayaan	Disparbud
14	Meningkatnya usaha pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	1. Program Administrasi Pemerintahan 5. Program pengembangan kebudayaan	Dinas PMD, Dinas Pariwisata dan kebudayaan
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka kriminalitas	3. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP dan damkar
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap zin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 3. Program penanganan pengaduan kegiatan Lingkungan Hidup 4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) 6. Program pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (Mha), kearifan lokal dan hak Mha yang terkait dengan PPLH 8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan	Dinas Lingkungan Hidup

			penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9. Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat 4. Program Pengelolaan persampahan	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintahan.

3.1. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PUSAT ATAU PROVINSI

1. BIDANG URUSAN PERTANIAN

1.1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

a. Dasar Hukum

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 018.08.4.199133/2024, tanggal 24 November 2023
b. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran kinerja Tahun Anggaran 2024
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.
d. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 829/1717/3/2024/DTPHBUN tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan, Pembantu Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Bendahara Pengeluaran dan Staf Penyusun Pelaporan On-Line pada Dinas Kab/Kota yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

c. Program dan Kegiatan

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
   a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
   b) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian
2. Program Dukungan Manajemen
   a) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana

d. Anggaran

APBN dengan jumlah dana : Rp. 2.325.150.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

e. Tahapan pelaksanaan kegiatan

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan

(benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui e-proposal.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.

f. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Target Kinerja

a. Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
   a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
      - Persiapan mulai dari Rapat Koordinasi dan Bimtek, berlanjut ke Pelaksanaan konstruksi irigasi perpipaan yang meliputi dokumen persiapan rancang bangunan, penentuan CPCL dan Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Irigasi Perpompaan untuk Pertanian.
      - Dokumen persiapan rancang bangunan, Penentuan CPCL, Rapat Koordinasi,

Bimtek, Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpipaan, Monitoring dan pelaporan.

- Irigasi perpompaan besar wilayah tengah yang meliputi persiapan, rapat koordinasi, Bimtek, Pelaksanaan konstruksi irigasi perpompaan dan terakhir monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan.

2. Fasilitas Pengelolaaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
   a. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
      - Kegiatan ini berupa pengumpulan data/informasi Alsintan dan UPJA
      - Pendampingan, pengawasan, monitoring dan pembinaan kelembagaan UPJA serta melakukan kegiatan pelaporan BAST online 6 bulan
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
   a. Layanan Manajemen Kinerja Internal
      (1) Layanan dukungan manajemen Satker 12 bulan

b. Target anggaran sebesar Rp. 2.325.150.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Realisasi

a. Capaian realisasi program/kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :
   1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
      a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

(1) Perpompaan Besar Wilayah Tengah dan Irigasi Perpipaan
- Pekerjaan konstruksi irigasi perpompaan sebanyak 9 unit.
- Pekerjaan konstruksi irigasi perpipaan sebanyak 12 unit.

2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
   a. Layanan Manajemen Kinerja Internal
      (1) Layanan dukungan manajemen Satker 12 bulan
      - Pengelolaan kegiatan Satker 12 bulan

b. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.288.600.000- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 98,43%.

Tabel 3.1.
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pertanian

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Prasarana dan Sarana Pertanian**	Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**2.325.150.000**	**2.288.600.000**	**98,43**		100	
			Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			**720.000.000**	**704.560.000**	97,85			
			Monitoring dan pelaporan			**9.000.000**	**5.610.000**	Monitoring dan pelaporan			
			Irigasi Perpipaan			**1.200.000.000**	**1.187.130.000**	99,17			
			Irigasi Perpompaan			**360.000.000**	**355.500.000**	**98,75**			
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			10.000.000	6.000.000	60			
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian			**35.150.000**	**29.800.000**	84,77	Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PSP		

2. Bidang Urusan Pangan

2.1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum : DIPA Nomor : SP DIPA-125.01.3.690717/2024, Revisi ke 02, tanggal 2 Februari 2024.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang urusan ketahanan pangan.

c. Program dan Kegiatan

1. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
   a. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga pangan

d. Anggaran

APBN dengan jumlah dana : Rp. 87.660.000,- (Delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

e. Tahapan pelaksanaan kegiatan

1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan melalui Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah
2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan
3. Penguatan Cadangan Pangan Nasional
4. Pengendalian Kerawanan Pangan dan

f. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Target Kinerja
   a. Target kinerja program/ kegiatan :
      1. Pemantapan ketersediaan dan stabilitas pasokan dan harga pangan yaitu tersusunnya prognosa neraca pangan wilayah.

2. Pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan yaitu tersusunnya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan level desa/kelurahan (buku FSVA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Target anggaran sebesar Rp. 87.660.000,- (Delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

2. Realisasi

a. Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 98,85 % dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemantapan ketersediaan dan stabilitas pasokan dan harga pangan yaitu tersusunnya prognosa neraca pangan wilayah.

2. Pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan yaitu tersusunnya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan level desa/kelurahan (buku FSVA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Realisasi anggaran 98,85% sebesar Rp. 87.525.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Tabel 3.2.
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pangan

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Ketahanan Pangan**	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	**PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS**	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**87.660.000**	**87.525.000**	**99,85**	Terwujudnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	**100**	
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.	**Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**			**87.660.000**	**87.525.000**	**99,85**			
			Rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan			12.650.000	12.560.000		Prognosa Neraca Pangan	100	
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan			41.850.000	41.840.000				
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan			9.660.000	9.650.000				
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			**23.500.000**	**23.475.000**	**99,89**	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan level desa dan kelurahan (buku FSVA) Kab. Kepulauan Selayar		
			Rekomendasi			23.500.000	23.470.000				

			Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan								

3.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan. Terbitnya aturan terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk menyesuaikan dengan pagu baru, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun atau bahkan tidak ada dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut adalah meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian /Lembaga) juga dengan untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA. Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan identifikasi capaian output kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan pagu baru.

Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar agar tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk terlaksananya program/kegiatan pembangunan pertanian.

BAB IV
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Penyusunan Laporan tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ini, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada penyelenggaraan SPM bidang Pendidikan.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan serta pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada penyelenggaraan SPM bidang pendidikan, terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar, yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Pendidikan Kesetaraan

2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 :

Tabel 4.1

Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Indikator Kinerja						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100%	2024	Angka Partisipasi Sekolah	100%	2024	
					Angka Partisipasi Murni	100%	2024	
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100%	2024	
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100%	2024	
					Rasio pengawas Sekolah untuk PAUD	100%	2024	
					Kecukupan Formasi Guru ASN	100%	2024	
					Indeks distribusi guru	100%	2024	
					Proporsi PTK bersertifikat	100%	2024	
					Proporsi PTK penggerak	100%		
2	a. Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7 - 12 tahun yang yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	2024			2024	
	Sekolah Dasar (SD)				Angka Partisipasi kasar	100%	2024	
					Angka Partisipasi Sekolah	100%	2024	
					Kemampuan Literasi	100%	2024	
					Kemampuan Numerasi	100%	2024	
					Perbedaan Skor Literasi	100%	2024	
					Perbedaan Skor	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Indikator Kinerja						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Numerasi			
					Indeks Iklim Keamanan	100%	2024	
					Indeks iklim kebinekaan	100%	2024	
					Indeks iklim inklusivitas	100%	2024	
					Kecukupan formasi guru ASN	100%	2024	
					Indeks distribusi guru	100%	2024	
					Proporsi PTK bersertifikat	100%	2024	
					Proporsi PTK Penggerak	100%	2024	
	b. Sekolah Menengah Pertama				Angka Partisipasi kasar	100%	2024	
					Angka Partisipasi Sekolah	100%	2024	
					Kemampuan Literasi	100%	2024	
					Kemampuan Numerasi	100%	2024	
					Perbedaan Skor Literasi	100%	2024	
					Perbedaan Skor Numerasi	100%	2024	
					Indeks Iklim Keamanan	100%	2024	
					Indeks iklim kebinekaan	100%	2024	
					Indeks iklim inklusivitas	100%	2024	
					Kecukupan formasi guru ASN	100%	2024	
					Indeks distribusi guru	100%	2024	
					Proporsi PTK bersertifikat	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Indikator Kinerja						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Proporsi PTK Penggerak	100%	2024	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Anak Usia 7 - 18 tahun yang yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	2024	Angka Partisipasi kasar	100%	2024	
					Angka Partisipasi Sekolah	100%	2024	
					Kemampuan Literasi	100%	2024	
					Kemampuan Numerasi	100%	2024	
					Perbedaan Skor Literasi	100%	2024	
					Perbedaan Skor Numerasi	100%	2024	
					Indeks Iklim Keamanan	100%	2024	
					Indeks Iklim Kebinekaan	100%	2024	
					Indeks iklim Inklusivitas	100%	2024	
					Kecukupan formasi guru ASN	100%	2024	
					Indeks distribusi guru	100%	2024	
					Proporsi PTK bersertifikat	100%	2024	
					Proporsi PTK Penggerak	100%	2024	

3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebesar Rp.26.881.661.650,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan memiliki Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

a) Pendidikan

- Strata dua (S2) : 9 Orang
- Strata satu (S1) : 20 Orang
- D3/D2/D1 : 2 Orang
- SLTA dan sederajat : 10 Orang
- SMP/Sederajat : 1 Orang

b) Pangkat dan golongan

- Golongan IV : 4 Orang
- Golongan III : 27 Orang
- Golongan II : 8 Orang
- Golongan I : 1 Orang

c) Eselon

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 9 Orang
- Staf :

  Funsional Umum : 21 Orang

  Fungsional Tertentu : 6 Orang

  Kontrak Daerah/PHL : 87 Orang

d) Kelompok Jabatan Fungsional UPT:

Guru ASN/PPPK TK/RA : 378 Orang

Guru ASN/PPPK SD/MI : 631 Orang

Guru ASN/PPPK SMP/MTS : 270 Orang

Pengawas Sekolah : 21 Orang

5. Hasil Capaian

Adapun hasil capaian penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	2024	Angka Partisipasi Sekolah	100%	93,78%	2024	
						Angka Partisipasi Murni	100%	63,40%	2024	
						Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100%	100%	2024	
						Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100%	100%	2024	
						Rasio pengawas Sekolah untuk PAUD	100%	100%	2024	
						Kecukupan Formasi Guru ASN	100%	99,18%	2024	
						Indeks distribusi guru	100%	78 %	2024	
						Proporsi PTK bersertifikat	100%	89,70 %	2024	
						Proporsi PTK penggerak	100%	24 %	2024	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7 - 12 tahun yang yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	97,6%	2024					
	a. Sekolah Dasar (SD)					Angka Partisipasi kasar	100%	98,45%	2024	
						Angka Partisipasi Sekolah	100%	98,45%	2024	
						Kemampuan Literasi	100%	95,42%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kemampuan Numerasi	100%	97,58%	2024	
						Perbedaan Skor Literasi	100%	53,67%	2024	
						Perbedaan Skor Numerasi	100%	19,67%	2024	
						Indeks Iklim Keamanan	100%	97,79%	2024	
						Indeks iklim kebinekaan	100%	99,50%	2024	
						Indeks iklim inklusivitas	100%	86,53%	2024	
						Kecukupan formasi guru ASN	100%	95,88%	2024	
						Indeks distribusi guru	100%	45%	2024	
						Proporsi PTK bersertifikat	100%	99,63%	2024	
						Proporsi PTK Penggerak	100%	60%	2024	
	b. Sekolah Menengah Pertama					Angka Partisipasi kasar	100%	82,83%	2024	
						Angka Partisipasi Sekolah	100%	82,83%	2024	
						Kemampuan Literasi	100%	85,20%	2024	
						Kemampuan Numerasi	100%	79,83%	2024	
						Perbedaan Skor Literasi	100%	65,33%	2024	
						Perbedaan Skor Numerasi	100%	53,67%	2024	
						Indeks Iklim Keamanan	100%	96,20%	2024	
						Indeks iklim kebinekaan	100%	99,46%	2024	
						Indeks iklim inklusivitas	100%	90,28%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kecukupan formasi guru ASN	100%	97,34%	2024	
						Indeks distribusi guru	100%	42,00%	2024	
						Proporsi PTK bersertifikat	100%	87,18%	2024	
						Proporsi PTK Penggerak	100%	93,30%	2024	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Anak Usia 7 - 18 tahun yang yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	87,66%	2024	Angka Partisipasi kasar	100%	100	2024	
						Angka Partisipasi Sekolah	100%	56,44	2024	
						Kemampuan Literasi	100%	68,16	2024	
						Kemampuan Numerasi	100%	54,10	2024	
						Perbedaan Skor Literasi	100%	82,50	2024	
						Perbedaan Skor Numerasi	100%	47,00	2024	
						Indeks Iklim Keamanan	100%	98,87	2024	
						Indeks Iklim Kebinekaan	100%	95,05	2024	
						Indeks iklim Inklusivitas	100%	98,60	2024	
						Kecukupan formasi guru ASN	100%	83,33	2024	
						Indeks distribusi guru	100%	88,88	2024	
						Proporsi PTK bersertifikat	100%	100		
						Proporsi PTK Penggerak	100%	100		

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan penerapan SPM bidang Pendidikan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3

Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	SPM Pendidikan Dasar masih 97,60%.	- Meningkatnya Angka putus Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). - Kurangnya Pemerataan Guru	- Faktor ekonomi keluarga - Faktor Budaya, masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 12 tahun
			- Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi
2	SPM Kesetaraan masih 87,66%.	- Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik masih terbatasnya jumlah tutor/pendidik - Partisipasi masyarakat yang masih rendah karena masih adanya stigma negative terhadap pendidikan kesetaraan dan minimnya motivasi peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan	- Tenaga pendidik yang ada khususnya kesetaraan masih berstatus tenaga guru honorer - Kesadaran Masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan masih rendah.

4.2.BIDANG URUSAN KESEHATAN

Sebagai kebutuhan dasar setiap manusia, pembangunan di bidang kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tapi juga Pemerintah Daerah. Namun demikian mengingat kebutuhan kesehatan yang vital, unik dan kompleks, serta perbedaan kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia, maka peran pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satu prinsipnya adalah SPM merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan

mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk pelaksanaan SPM tersebut, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Permenkes ini sudah mengakomodir konsep baru SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Konsep SPM yang baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d) Pelayanan kesehatan balita
e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 :

Tabel 4.4

Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%	2024	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	100%	2024	
					Tablet tambah darah	100%	2024	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	100%	2024	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	100%	2024	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	100%	2024	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	100%	2024	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	100%	2024	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	2024	
					Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2024	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Gel USG	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan:	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga Kefarmasian			
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
					Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	100%	2024	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%	2024	Formulir partograf	100%	2024	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	2024	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2024	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2024	Vaksin hepatitis B dosis tunggal *(prefilled syringe)*	100%	2024	
					2. Vitamin K1 injeksi	100%	2024	
					Salep/tetes mata antibiotik	100%	2024	
					Formulir bayi baru lahir	100%	2024	
					Formulir Manajemen Terpadu Balita	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Muda (MTBM)			
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2024	
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
					Kader Kesehatan	100%	2024	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2024	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	100%	2024	
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	100%	2024	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2024	
					Vitamin A Biru	100%	2024	
					Vitamin A Merah	100%	2024	
					Vaksin imunisasi dasar: BCG	100%	2024	
					Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	100%	2024	
					Vaksin imunisasi dasar: IPV	100%	2024	
					Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB-Hib	100%	2024	
					Vaksin imunisasi dasar: Campak -	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Rubella			
					Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	100%	2024	
					Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	100%	2024	
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100%	2024	
					Peralatan Anafilaktik	100%	2024	
					Formula Terapi Gizi Buruk	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
					Guru PAUD	100%	2024	
					Kader Kesehatan	100%	2024	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	2024	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	100%	2024	
					Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	100%	2024	
					Kuesioner skrining kesehatan	100%	2024	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100%	2024	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100%	2024	
					Tablet Tambah Darah pada remaja	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah			
					Alat Pemeriksaan Hb	100%	2024	
					Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	100%	2024	
					Media promosi kesehatan	100%	2024	
					Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2024	
					Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kealifikasi tertentu : Guru	100%	2024	
					Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kealifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peerconselor	100%	2024	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	2024	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Alat: Tensimeter	100%	2024	
					Alat: Glukometer	100%	2024	
					Alat: Alat Pemeriksa Hb	100%	2024	
					Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	100%	2024	
					Alat: KIT IVA Tes	100%	2024	
					Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	100%	2024	
					Kit Opthalmologi Komunitas	100%	2024	
					Kuesioner PUMA	100%	2024	
					Alat Pelayanan KB	100%	2024	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100%	2024	
					Vaksin Tetanus Difteri (td)	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2024	
					Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kealifikasi tertentu	100%	2024	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	2024	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	100%	2024	
					Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	100%	2024	
					Alat pemeriksaan	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kolesterol			
					Bahan Medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	100%	2024	
					Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / *Activity Daily Living* (ADL Barthel)	100%	2024	
					Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	100%	2024	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2024	
					Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	100%	2024	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2024	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Obat Hipertensi	100%	2024	
					Tensimeter	100%	2024	
					Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sehat Indonesiaku (ASIK)			
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2024	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2024	Obat Diabetes Melitus	100%	2024	
					Fotometer atau Glukometer	100%	2024	
					BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	100%	2024	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Informasi Manajemen Puskesmas)			
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	100%	2024	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2024	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	100%	2024	
					Penyediaan Psikofarmaka	100%	2024	
					Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	100%	2024	
					Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	100%	2024	
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Edukasi (KIE)			
					Tenaga kesehatan: Dokter	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	100%	2024	
					Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	100%	2024	
					Tenaga profesional lainnya	100%	2024	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standard	100%	2024	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Reagen Zn TB	100%	2024	
					Masker bedah dan Masker N95	100%	2024	
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	100%	2024	
					Katrid tes cepat molekuler	100%	2024	
					Formulir pencatatan dan pelaporan	100%	2024	
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	2024	
					Tuberkulin	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kefarmasian			
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Radiografer		2024	
					Kader Kesehatan		2024	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%	2024	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2024	
					Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	100%	2024	
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	100%	2024	
					Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	100%	2024	
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	100%	2024	
					Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	100%	2024	
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	100%	2024	

3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.858.526.033,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : Rp. 1.350.300.000
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin : Rp. 378.819.000
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : Rp. 96.707.233
4. Pelayanan Kesehatan Balita : Rp. 84.005.000
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar : Rp. 558.750.000
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif : Rp. 120.000.000
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut : Rp. 203.400.000
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi : Rp. 107.935.000
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus : Rp. 254.949.800
10. Pelayanan Kesehatan ODGJ berat : Rp. 78.710.000
11. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan : Rp. 481.250.000
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV : Rp. 143.700.000

4. Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian bidang urusan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 489 orang dan pegawai Non ASN sebanyak 1591 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan , untuk pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kesehatan didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi, yaitu lulusan S2 dengan jumlah 9 orang, S1 dengan jumlah 75 orang, D3 dengan jumlah 82 orang dan SMA dengan jumlah 43 orang, D4 sebanyak 9 orang dan untuk profesi Profesor sebanyak 13 orang dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 237 orang. Selanjutnya untuk pegawai ASN bisa dilihat dari golongan/ruang, dari 489 pegawai yang termasuk dalamgolongan IV sebanyak 48 pegawai (9,82 %), golongan III sebanyak 315 pegawai (64,42 %) dan golongan II sebanyak 124 pegawai (25,36 %), serta golongan I sebanyak 2 pegawai (0,41 %) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2024

No.	Golongan/Ruang	Jumlah	Persentase (%)
1.	IV	48	9,82
2.	III	315	64,42
3.	II	124	25,36
4.	I	2	0,41

Dari sisi kedudukan dalam Organisasi, dari 489 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3,57 %) yang menduduki Eselon II, 5 pegawai (17,86 %) yang menduduki Eselon III, 10 Pegawai (27,86 %) yang menduduki Eselon IV, 399 pegawai (81,60 %) yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, serta 35 pegawai (71,57 %) yang termasuk dalam Jabatan Fungsional Umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Jumlah Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2024

No.	**Jabatan**	**Jumlah**	**Persentase (%)**
1.	Eselon II	1	3,57
2.	Eselon III	5	17,86
3.	Eselon IV	10	27,86

4.	Jabatan Fungsional Tertentu	399	81,60
5.	Jabatan Fungsional Umum	35	71,56

Selain itu, SDM Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki tenaga kesehatan yang tersebar di 15 Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Dokter Spesialis	9	0,6
2.	Dokter Umum	34	2,4
3.	Dokter Gigi	21	1,46
4.	Perawat	389	26,9
5.	Bidan	649	44,9
6.	Kesehatan Masyarakat	68	4,7
7.	Kesehatan Lingkungan	26	1,8
8.	Kefarmasian	7	0,5
9.	Apoteker	49	3,4
10.	Laboratorium	24	1,6
11.	Teknisi Medis	11	0,7
12.	Teknisi Penunjang	160	11,1

5. Hasil Capaian

Adapun hasil capaian penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%	100%	2024	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	100%	100 %	2024	
						Tablet tambah darah	100%	100 %	2024	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil:	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Test Kehamilan				
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	100%	100 %	2024	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	100%	100 %	2024	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	100%	100 %	2024	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	100%	100 %	2024	
						Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	100 %	2024	
						Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	100 %	2024	
						Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2024	
						Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2024	
						Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	100%	69,38 %	2024	
2	Pelayana	Persentase ibu	100%	98,92%	2024	Formulir	100%	98,92%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	n Kesehatan Ibu Bersalin	bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.				partograf				
						Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	98,92%	2024	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	98,92%	2024	
						Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100%	2024	
						Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100%	2024	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%	2024	Vaksin hepatitis B dosis tunggal *(prefilled syringe)*	100%	100%	2024	
						2. Vitamin K1 injeksi	100%	100%	2024	
						Salep/tetes mata antibiotik	100%	100%	2024	
						Formulir bayi baru lahir	100%	100%	2024	
						Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	100%	100%	2024	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	100%	2024	
						Media Promosi Komunikasi	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Informasi dan Edukasi (KIE)				
						Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100%	2024	
						Kader Kesehatan	100%	100%	2024	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	90.73%	2024	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	100%	90,73%	2024	
						Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	100%	90,73%	2024	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	100%	2024	
						Vitamin A Biru	100%	90,73%	2024	
						Vitamin A Merah	100%	90,73%	2024	
						Vaksin imunisasi dasar: BCG	100%	90,73%	2024	
						Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	100%	90,73%	2024	
						Vaksin imunisasi dasar: IPV	100%	90,73%	2024	
						Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB-Hib	100%	90,73%	2024	
						Vaksin imunisasi dasar: Campak -	100%	90,73%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rubella				
						Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB -Hib	100%	90,73%	2024	
						Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	100%	90,73%	2024	
						Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100%	100%	2024	
						Peralatan Anafilaktik	100%	100%	2024	
						Formula Terapi Gizi Buruk	100%	100%	2024	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100%	2024	
						Guru PAUD	100%	100%	2024	
						Kader Kesehatan	100%	100%	2024	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	60,28%	2024	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	100%	60,28%	2024	
						Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	100%	60,28%	2024	
						Kuesioner skrining kesehatan	100%	60,28%	2024	
						Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100%	60,28%	2024	
						Formulir	100%	60,28%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah				
						Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	100%	60,28%	2024	
						Alat Pemeriksaan Hb	100%	100%	2024	
						Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	100%	60,28%	2024	
						Media promosi kesehatan	100%	100%	2024	
						Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	100%	60,28%	2024	
						Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100%	2024	
						Guru	100%	100%	2024	
						Kader Kesehatan	100%	100%	2024	
6	Pelayanan	Persentase warga negara	100%	100%	2024	Media promosi Komunikasi	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesehatan Pada Usia Produktif	Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.				Informasi dan Edukasi (KIE)				
						Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	100%	100%	2024	
						Alat: Tensimeter	100%	100%	2024	
						Alat: Glukometer	100%	100%	2024	
						Alat: Alat Pemeriksa Hb	100%	100%	2024	
						Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	100%	100%	2024	
						Alat: KIT IVA Tes	100%	100%	2024	
						Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	100%	100%	2024	
						Kit Opthalmologi Komunitas	100%	100%	2024	
						Kuesioner PUMA	100%	100%	2024	
						Alat Pelayanan KB	100%	100%	2024	
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100%	100%	2024	
						Vaksin Tetanus Difteri (td)	100%	100%	2024	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100%	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Masyarakat				
						Kader Kesehatan terlatih	100%	100%	2024	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	70,93%	2024	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	100%	100 %	2024	
						Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	100%	100 %	2024	
						Alat pemeriksaan kolesterol	100%	100 %	2024	
						Bahan Medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	100%	100 %	2024	
						Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / *Activity Daily Living* (ADL Barthel)	100%	100 %	2024	
						Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	100%	100 %	2024	
						Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2024	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2024	
						Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	100%	100 %	2024	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%	2024	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100%	100 %	2024	
						Obat Hipertensi	100%	100 %	2024	
						Tensimeter	100%	100 %	2024	
						Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	100%	100 %	2024	
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2024	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kefarmasian				
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2024	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%	2024	Obat Diabetes Melitus	100%	100 %	2024	
						Fotometer atau Glukometer	100%	100 %	2024	
						BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	100%	100 %	2024	
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	100%	100 %	2024	
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2024	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	100%	100 %	2024	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%	2024	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	100%	100 %	2024	
						Penyediaan Psikofarmaka	100%	100 %	2024	
						Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	100%	100 %	2024	
						Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	100%	100 %	2024	
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Dokter	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kewenangan di bidang kesehatan jiwa				
						Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	100%	100 %	2024	
						Tenaga profesional lainnya	100%	100 %	2024	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standard	100%	73,87 %	2024	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2024	
						Reagen Zn TB	100%	100 %	2024	
						Masker bedah dan Masker N95	100%	100 %	2024	
						Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	100%	100 %	2024	
						Katrid tes cepat molekuler	100%	100 %	2024	
						Formulir pencatatan dan pelaporan	100%	100 %	2024	
						Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100 %	2024	
						Tuberkulin	100%	100 %	2024	
						Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan:	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga Kesehatan Masyarakat				
						Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Radiografer	100%	100 %	2024	
						Kader Kesehatan	100%	100 %	2024	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%	100%	2024	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2024	
						Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	100%	100 %	2024	
						Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	100%	100 %	2024	
						Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	100%	100 %	2024	
						Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	100%	100 %	2024	
						Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	100%	100 %	2024	
						Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	100%	100 %	2024	

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Selayar merupakan daerah kepulauan dengan beberapa pulau kecil yang berpenghuni yang menyebar di wilayah kepulauan dengan jarak antar pulau yang jauh yang menghambat distribusi layanan Kesehatan yang merata.
2. Anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Masih banyak ibu hamil yang melakukan persalinan di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Masih banyak warga yang tidak antusias membawa balita ke Posyandu.
5. Kegiatan penjaringan anak sekolah dilakukan pada saat tahun ajaran baru (triwulan 3) sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
6. Para lansia masih kurang menyadari pentingnya Kesehatan, masih kurang motivasi untuk melakukan skrining ke Posbindu.

7. Pelayanan untuk pemeriksaan spesimen dahak di Laboratorium Puskesmas atau Laboratorium TCM terutama di desa-desa terpencil di wilayah kepulauan terhambat oleh akses, sehingga banyak yang terduga TBC di desa-desa terpencil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
8. Pulau-pulau kecil yang masuk dalam 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dari segi infrastruktur sangat terbatas terutama transportasi, komunikasi, listrik, menyulitkan distribusi obat, vaksin dan peralatan medis.
9. Terbatasnya tenaga Kesehatan di daerah terpencil serta kurangnya motivasi untuk bertugas di daerah terpencil.

b. Solusi

1. Mengoptimalkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Posyandu dan Posbindu).
2. Mengotimalkan pelayanan Kesehatan bergerak, yaitu program untuk melayani Kesehatan Masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
3. Mengembangkan Rumah Sakit Pratama untuk meningkatkan akses di pulau-pulau kecil dan meningkatkan kapasitas puskesmas yang ada.
4. Pelayanan Kesehatan secara mobile dan terpadu terutama untuk pulau pulau kecil melalui kegiatan puskesmas keliling.
5. Pemenuhan SDM Kesehatan.
6. Pemenuhan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.
7. Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan.
8. Dukungan dana dari pemerintah daerah yang belum optimal karena beberapa pembiayaan untuk mendukung program yag masuk dalam SPM khususnya dalam upaya penemuan kasus di Masyarakat masih kurang.

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Bidang Urusan Pekerjaan Umum memiliki 2 (dua) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pengolahan air limbah domestik. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada bidang urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Selayar mengarah kepada peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Pekerjaan Umum memiliki 2 jenis pelayanan dasar, yakni :

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
b. Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 :

Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	100%	2024				
					A. Jaringan Perpipaan			
					- Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM			
					- Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	100%	2024	
					B. Bukan Jaringan Perpipaan			
					- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	100%	2024	
					- Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan bukan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2024	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2024	
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	-	2024	
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke	100	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T			

3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp. 4.375.226.001,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum memiliki Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

Tabel 4.10
Jumlah Personil ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Jumlah Pegawai	Pangkat dan Golongan
1	1 Orang	Pembina Utama Muda, IV/c
2	2 Orang	Pembina Tk. I, IV/b
3	4 Orang	Pembina, IV/a
4	8 Orang	Penata Tk. I, III/d
5	6 Orang	Penata, III/c
6	12 Orang	Penata Muda Tk.I, III/b
7	10 Orang	Penata Muda, III/a
8	3 Orang	Pengatur Tk. I, II/d
9	3 Orang	Pengatur, II/c
10	6 Orang	Golongan IX
11	5 Orang	Golongan V

Tabel 4.11
Jumlah Personil Non ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jumlah Pegawai Non PNS	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1	-	Pascasarjana	
2	50	S1	
3	55	D3	
4	13	SMA	

5. Hasil Capaian

Tabel 4.12

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	100%	100%	2024					
						A. Jaringan Perpipaan				
						- Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	-	-	2024	Belum ada di Kabupaten Kepulauan Selayar
						B. Bukan Jaringan Perpipaan				
						Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	100%	100 %	2024	
						Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan bukan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	100%	100 %	2024	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan	Persentase warga Negara yang memperoleh	100%	100%	2024	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Air limbah Domestik	layanan pengolahan Air Limbah Domestik				pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik				
						Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	100%	100%	2024	(Tutup Mutu)
						Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa	100%	100 %	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T				

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

a. Permasalahan

1. Belum adanya Data Konfrehensif terkait Jumlah RUmah Tangga yang belum mempunyai Sarana Air Bersih yang baik yang bersumber dari PDAM, Sumur Gali, Sumur Bor/ dalam atau Sumber Air Bersih. Terkait data Jumlah Unit pengolahan setempat Komunal belum tersedia. Pengumpulan data Real BNBA Terkendala masalah Anggaran
2. Terbatasnya anggaran pada tiap indikator menyebabkan target-target yang ditetapkan belum tercapai.
3. Untuk kegiaan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) yang dibangun dengan belanja modal, belum/tidak tersedia anggaran pemeliharaannya.
4. Sinergi yang belum maksimal antara seluruh stakeholder pengelola pelayanan dasar sanitasi dan air minum (perangkat daerah, BUMD, kementerian terkait dan kelompok pengelola).
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait pengelolan sanitasi dan air minum.

b. Solusi

1. Melakukan Sodialisasi di Masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.

2. Diperlukan alokasi dana yang memprioritaskan terlaksananya program-program/ indikator SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Anggaran pemeliharaan diperlukan untuk menjaga nilai guna sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
4. Anggaran untuk pendataan BNBA Sarana Prasarana Air Bersih
5. Membangun sinergi dengan arah, tujuan dan keinginan serta perilaku yang nyata dalam meningkatkan pelayanan dasar bidang sanitasi dan air minum.
6. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pelatihan formal maupun non formal.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada bidang Perumahan Rakyat ada dua yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten.

   Layanan ini merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan :

   a. Pada saat masa pasca bencana;
   b. Surat penetapan bencana dari Bupati;
   c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten. Merupakan jenis layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

a. Pengurangan kawasan kumuh 5 - 10 Ha; dan/atau
b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

Dalam hal tidak terjadi bencana, untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan rutin seperti melakukan pengumpulan data dan pendataan identifikasi perumahan. Oleh karena itu, untuk capaian SPM dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan diluar dua jenis layanan sesuai dengan pelaporan e-SPM di aplikasi Kementerian Dalam Negeri dengan memenuhi atau mengisi Form A, B dan C yaitu form Pendataan, Penghitungan Kebutuhan dan Perencanaan.

2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 :

Tabel 4.13
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2024	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100%	2024	Belum ada penganggaran untuk penyediaan rumah layak huni karena tidak terjadi bencana dalam skala besar dan masif, penganggaran dialokasikan untuk pengumpulan data rutin sebagai
					Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100%	2024	
					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100%	2024	
					Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					bagi korban bencana.			pemenuhan SPM.
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	2024	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100%	2024	Belum ada rumah yang terkena program Pemerintah dan juga belum ada lahan tersedia untuk relokasi
					Subsidi uang sewa	100%	2024	
					Penyediaan rumah layak huni	100%	2024	

Dalam hal tidak terjadi bencana, untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan rutin seperti melakukan pengumpulan data dan pendataan identifikasi perumahan.

3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 dialokasikan untuk kegiatan identifikasi dan pendataan dengan anggaran sebesar Rp. 109.742.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat memiliki Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

Tabel 4.14
Jumlah Personil ASN Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Pangkat

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	**Eselon**	**7**
a.	II b	1
b.	III a	1
c.	III b	3
d.	IV a	2
2.	**Jabatan Fungsional**	**8**
a.	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	4
b.	Analis Kebijakan Ahli Muda	1
c.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	**3**
3.	**Pangkat/Golongan**	**27**
a.	IV	5
b.	III	19
c.	II	3
4.	**Jenjang Pendidikan**	**27**
a.	S3	1
b.	S2	2
c.	S1	21
d.	SMA Sederajat	3

5. Hasil Capaian

Dalam hal tidak terjadi bencana dalam skala besar maka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan dengan kegiatan Identifikasi dan pemenuhan 3 (tiga) tahapan penerapan SPM.

Berikut capaian pelaksanaan pemenuhan 3 (tiga) tahapan penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum didalam aplikasi e-SPM Kemendagri sebagai berikut :

Tabel 4.15
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Format	Persentase Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Dalam Hal tidak terjadi Bencana, maka diminta untuk melakukan 3 tahapan dan mengisi format A, B, C	100%	Tidak ada bencana dalam skala besar yang ditetapkan oleh kepala daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
A. Pendataan	Form. 4. A.4, Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana,	100%	
	Form. 4. A.5 Identifikasi Lahan Potensial,	100%	
	Form. 4. A. 6 Pengumpulan Data Rumah yang terkena Bencana	100%	
B. Penghitungan Kebutuhan	Form. 4. B.3, Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana	100%	
	Form. 4. B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana	100%	
C. Perencanaan	Form. 4. C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana	100%	
Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Dalam Hal tidak ada relokasi, diminta untuk melaksanakann 3 tahapan dan mengisi form A, B, C	100%	Tidak ada kegiatan relokasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda sehingga diminta melampirkan format A, B, C
A. Pendataan	Form. 4. A. 10 Identifikasi Perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya	100%	

	Form. 4. A. 11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman	100%	
	Form. 4. A. 12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh	100%	
	Form. 4. A. 13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi	100%	
B. Penghitungan Kebutuhan	Form. 4. B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%	
	Form. 4. B. 8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah	100%	
C. Perencanaan	Form 4. C. 4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	100%	

Sumber : Aplikasi e-SPM Kemendagri

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a. Kendala dan Permasalahan

Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan adalah :

1. Pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan korban bencana dilakukan setelah adanya Sk penetapan bencana dari Bupati sehingga bisa menyebabkan pemberian bantuan bisa terlambat.
2. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan SPM bidang Perumahan sehingga bila terjadi bencana bisa menjadi kendala dan pemberian bantuan bisa terhambat.
3. Adanya persyaratan bahwa pemberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
4. Belum adanya kajian resiko bencana dalam bentuk Peraturan Daerah tentang penentuan lokasi daerah rawan bencana.
5. Belum maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal atau OPD yang terkait.
6. Kurangnya SDM yang terlatih dan memahami penerapan dan pelaksanaan secara teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan.
7. Kurangnya/Tidak adanya lahan untuk relokasi korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
8. Belum adanya sarana dan Prasarana terkait Layanan dasar di bidang Perumahan

b. Solusi

1. Perlu adanya Pemetaan daerah rawan bencana secara rinci dan juga perlu ditetapkan dalam bentuk Perda.
2. Memprioritaskan anggaran untuk pelaksanaan SPM bidang Perumahan.
3. Memaksimalkan koordinasi antar OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal atau OPD yang terkait.
4. Perlu peningkatan sumber daya manusia sehingga dalam penerapan dan pelaksanaan SPM dapat maksimal (Bimtek, dll)
5. Menambah anggaran untuk Peningkatan kapasitas aparatur (SDM) khususnya terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan.

6. Perlu adanya pembebasan Lahan dari Pemerintah Daerah
7. Perlu ada bantuan/penganggaran sarana dan prasarana terkait layanan
8. Perlunya ada komunikasi dan koordinasi lebih awal antar OPD yang menangani bencana dalam hal ini BPBD dan Disperkim agar tidak terjadi keterlambatan pengurusan SK BNBA bagi calon penerima bantuan. Namun, karena hal ini telah terjadi, untunk ke depannya diperlukan kesepahaman mengenai pentingnya penerbitan SK BNBA untuk dasar pelaksanaan bagi OPD pelaksana.
9. Informasi terjadinya bencana sudah seharusnya secara cepat disampaikan kepada OPD yang berhubungan dengan penanganan pasca bencana untuk dikoordinasikan agar penanganan dan perencanaan penganggaran dapat segera dilakukan.

4.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

4.5.1. SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Republik Indonesia.

Adapun fungsi Pemadam Kebakaran sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dilakukan penggabungan ke dalam Institusi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga nomenklatur saat ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum;

b. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Sub Urusan Trantibum di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 :

Tabel 4.16

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperol eh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	2024	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	100%	2024	
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	100%	2024	
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	100%	2024	
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)			

c. **Anggaran**

Adapun besaran anggaran SPM sub urusan Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp. 1.055.032.700,-. Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024 sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pelayanan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok mengalokasikan anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM, adapun kegiatan tersebut adalah Pengawasan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Peredaran Cukai Rokok Ilegal.

d. **Dukungan Personil**

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar berjumlah 341 Orang terdiri dari :

Tabel 4.17

Jumlah Personil Aktif Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

TAHUN 2022	JUMLAH
PNS	47 Orang
PPPK	7
NON PNS	287 Orang
JUMLAH	341 Orang

Tabel 4.18

Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata Dua (S2)	7 Orang	PNS
2.	Strata 1(S1)	38 Orang	15 Orang PNS, 23 Orang (NonPNS)
3.	D3	3 Orang	NonPNS
4.	D2	5 Orang	Non PNS
5.	SLTA/Sederajat	256 Orang	24 Orang (PNS), 225 Orang (NonPNS) 6 Orang (PPPK)
6.	SLTP/Sederjat	4 Orang	Non PNS
7	Paket C	28 Orang	1 Orang (PNS), 26 Orang (Non PNS), 1 Orang (PPPK)
	Total	**341 Orang**	

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa **Jumlah Personil Organik (PNS) Sangat Kurang dibandingkan Jumlah Personil Non Organisk (NON PNS)** dan didominasi Personil dengan tingkat Pendidikan SLTA sebesar 76,79%, Sarjana (S1) sebesar 9,82% dan Sarjana (S2) sebesar 0,89% sedangkan sisanya adalah DIII, DII, SLTP dan Paket C sebesar 12,5%.

e. Hasil Capaian

Tabel 4.19

Realisasi SPM Sub Urusan Trantibum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan	Jumlah Warga	100%	100%	2024	Standar sarana	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ketentram an dan ketertiban umum	Negara yang memperol eh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada				prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)				
						Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	100%	100%	2024	
						Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(jumlah dan kualitas personil/SDM)				
						Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	100%	100%	2024	

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024 antara lain :

1. Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

   Solusi Mengikutsertakan Personil Satpol.PP mengikuti Diklat Penyidik guna mengoptimalkan fungsi penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda dan perkada.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

   Solusi Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung terutama alat pemadam kebakaran
3. Terbatasnya Anggaran Operasional Penegakan Perda dan Pemadam

Kebakaran

Solusi Mengusulkan Penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional.

4.5.2. SUB URUSAN KEBENCANAAN

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar sub urusan kebencanaan adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan informasi rawan bencana di daerah
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

b. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 :

Tabel 4.20

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	2024	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)			
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%	2024	
					Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	100%	2024	
					Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100%	2024	
2	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap bencana	100%	2024	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi)	100%	2024	
					Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	100%	2024	
3	Pelayanan Penyelamatan dan	Jumlah warga negara yang memperoleh	100%	2024	Aktivasi sistem komando penanganan darurat	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Evakuasi Korban Bencana	layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)			
					Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100%	2024	
					Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	100%	2024	
					Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	100%	2024	
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100%	2024	

c. **Anggaran**

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana Kab. Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar Rp. 752.879.300,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Pelayanan Informasi rawan bencana Rp. 90.985.000,-

2) Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana Rp. 294.009.000,-

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp. 367.885.300,-

d. **Dukungan Personil**

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.21
Data Pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	2	3
1	ESELON	
	a. II	1 orang
	b. III	4 orang
	c. IV	3 orang
2	JABATAN FUNGSIONAL	
	a. Pelaksana	7 orang
	b. Pertama	-
	c. Muda	2 orang
	d. PPPK	2 orang
3	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV/c	1 orang
	b. IV/b	1 orang
	c. IV/a	2 orang
	d. III/d	6 orang
	e. III/c	-
	f. III/b	3 orang
	g. III/a	2 orang
	h. II/d	1 orang
	i. II/c	1 orang
	j. II/a	-
	k. PPPK/ IX	2 orang
4	JENJANG PENDIDIKAN	

	a. S2	6 orang
	b. S1	11 orang
	c. SMA	2 orang

e. Hasil Capaian

Tabel 4.22

Realisasi SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%	2024	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	100%	100%	2024	
						Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%	100%	2024	
						Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)				
						Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100%	100%	2024	
2	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap bencana	100%	100%	2024	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi)	100%	100%	2024	
						Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	100%	100%	2024	
3	Pelayanan Penyela	Jumlah warga negara yang memperoleh	100%	100%	2024	Aktivasi sistem komando	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	matan dan Evakuasi Korban Bencana	layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				penanganan darurat bencana (terlaksanaya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)				
						Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100%	100%	2024	
						Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	100%	100%	2024	
						Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	100%	100%	2024	Tutup Mutu

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100%	100%	2024	

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih dan kompeten dibidang kebencanaan.
2. Belum terwujudnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang seharusnya menjadi prioritas terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
3. Belum akuratnya data penduduk yang berada di wilayah rawan bencana terkait pemenuhan SPM;
4. Keterbatasan anggaran dalam menunjang kegiatan pemenuhan pelayanan dasar kepada warga negara yang berada dikawasan rawan bencana seperti contoh masih kurangnya masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana karena pelaksanaan pelatihan belum rutin dilaksanakan setiap tahunnya;
5. Belum optimalnya peralatan dasar dan pendukung dalam rangka penguatan kelembagaan / kesiapsiagaan terhadap bencana.
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat bencana) seperti kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) yang berfungsi sebagai alat mobilisasi

penanganan darurat bencana di wilayah yang terdampak bencana dan kurangnya peralatan water rescue yang menunjang pelaksanaan evakuasi penyelamatan korban bencana di perairan/laut.

7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang kebencanaan, ini disebabkan masih kurangnya kompetensi/skill SDM BPBD yang mumpuni dalam pengoperasian peralatan teknologi informasi kebencanaan.

Adapun solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dan penambahan jumlah Dana Tak Terduga Kebencanaan;
2. Perlunya penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) sebagai bentuk perpanjangan tangan BPBD di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, contohnya dapat membentuk posko siaga bencana di tingkat Desa sebagai upaya meningkatkan efektivitas penanganan bencana;
3. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penyediaan peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan dalam penanganan Bencana.
4. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kendaraan operasional lapangan (mobil rescue) sehingga nantinya respon cepat penanganan bencana dapat terlaksana real time.
5. Diperlukan dukungan kerjasama dengan Pemerintahan Desa dalam pemenuhan pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu papan informasi bencana pada wilayahnya yang dapat dianggarkan pada APBD Desa melalui kegiatan tanggap darurat bencana.
6. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan secara

berkala dan berkelanjutan tiap tahunnya kepada para relawan bencana desa yang ada pada daerah rawan bencana.

7. Memberikan kesempatan kepada SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan sehingga diharapkan kedepannya SDM BPBD dapat memiliki kompetensi/keahlian/skill yang mumpuni dan professional dalam bidang teknologi informasi.
8. Perlu adanya peningkatan kualitas keahlian/kompetensi/ skill tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan memfasilitasi mengikutsertakan TRC dalam pelatihan-pelatihan teknis kebencanaan di Kabupaten/Provinsi dan di tingkat Nasional.

4.5.3. SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan pemukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah tanggungjawab daerah otonom.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Pemadam Kebakaran mencakup :

1) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;

b. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 :

Tabel 4.23

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2024	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	100%	2024	
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	100%	2024	
					Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, … dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	100%	2024	
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)			
					Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	100%	2024	
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100%	2024	

c. Anggaran

Adapun besaran anggaran SPM sub urusan pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp. 445.000.000,-. Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024 sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pelayanan Pemadam Kebakaran terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok mengalokasikan anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM, adapun kegiatan tersebut adalah Pengawasan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Peredaran Cukai Rokok Ilegal.

d. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar berjumlah 341 Orang terdiri dari :

Tabel 4.24

Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata Dua (S2)	7 Orang	PNS
2.	Strata 1(S1)	38 Orang	15 Orang PNS, 23 Orang (NonPNS)
3.	D3	3 Orang	NonPNS
4.	D2	5 Orang	Non PNS
5.	SLTA/Sederajat	256 Orang	24 Orang (PNS), 225 Orang (NonPNS) 6 Orang (PPPK)
6.	SLTP/Sederjat	4 Orang	Non PNS
7	Paket C	28 Orang	1 Orang (PNS), 26 Orang (Non PNS), 1 Orang (PPPK)
	Total	**341 Orang**	

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa **Jumlah Personil Organik (PNS) Sangat Kurang dibandingkan Jumlah Personil Non Organisk (NON PNS)** dan didominasi Personil dengan tingkat Pendidikan SLTA sebesar 76,79%, Sarjana (S1) sebesar 9,82% dan Sarjana (S2) sebesar 0,89% sedangkan sisanya adalah DIII, DII, SLTP dan Paket C sebesar 12,5%.

e. Hasil Capaian

Tabel 4.25

Realisasi SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	2024	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	100%	85%	2024	
						Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	100%	100%	2024	
						Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan,	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)				
						Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	100%	100%	2024	
						Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	100%	43,33%	2024	
						Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100%	100%	2024	

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Ketentraman dan Ketertiban

Umum dan Sub Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024 antara lain :

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

   Solusi Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung terutama alat pemadam kebakaran
2. Terbatasnya Anggaran Operasional Penegakan Perda dan Pemadam Kebakaran

   Solusi Mengusulkan Penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Sosial memiliki 5 jenis pelayanan dasar, yakni :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 :

Tabel 4.26
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2024	Layanan data dan pengaduan	100%	2024	
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	2024	
					Penyediaan permakanan	100%	2024	
					Penyediaan sandang	100%	2024	
					Penyediaan alat bantu	100%	2024	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	2024	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	2024	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100%	2024	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100%	2024	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100%	2024	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	2024	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2024	
					Layanan rujukan	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024	Layanan data dan pengaduan	100%	2024	
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	100%	2024	
					Penyediaan permakanan	100%	2024	
					Penyediaan sandang	100%	2024	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	2024	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	2024	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	100%	2024	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100%	2024	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100%	2024	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	2024	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2024	
					Layanan rujukan	100%	2024	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024	Layanan data dan pengaduan	100%	2024	
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	2024	
					Penyediaan permakanan	100%	2024	
					Penyediaan sandang	100%	2024	
					Penyediaan alat bantu	100%	2024	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					P3K)			
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	2024	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	100%	2024	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	100%	2024	
					Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	100%	2024	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	2024	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2024	
					Layanan rujukan	100%	2024	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2024	Layanan data dan pengaduan	100%	2024	
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	2024	
					Penyediaan permakanan	100%	2024	
					Penyediaan sandang	100%	2024	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	2024	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	2024	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	100%	2024	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan			
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100%	2024	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	2024	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2024	
					Layanan rujukan	100%	2024	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	2024	Penyediaan permakanan	100%	2024	
					Penyediaan sandang	100%	2024	
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%	2024	
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%	2024	
					Pelayanan dukungan Psikososial	100%	2024	

3. Anggaran

Sebagai salah satu unsur pendukung yang memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, maka keberadaan sumber pendanaan mutlak diperlukan. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2024 mendapat alokasi dana melalui APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

a) Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial dengan total anggaran sebesar Rp 163.400.000

(Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Adapun rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Permakanan, anggaran Rp. *132.400.000,-(Seratus Tiga Puluh Dua Empat Ratus Ribu Rupiah)* dengan target 39 KPM dengan rincian Lanjut Usia sebanyak 34 Orang dan Anak/Yatim Piatu Sebanyak 5 Orang
2. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak dengan anggaran Rp. 1.000.000,- *(Satu Juta Rupiah)* dengan target 10 Orang.
3. Pemberian Layanan Kedaruratan (Pendampingan ABH) dengan anggaran Rp. 10.000.000,- *(Sepuluh Juta Rupiah)* dengan target sebanyak 30 Orang anak.
4. Pemberian layanan rujukan dengan anggaran Rp. 20.000.000,-*(Dua Puluh Juta Rupiah)* dengan target sebanyak 20 orang untuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan 1 Orang untuk Gelandangan/Pengemis.

b) Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 240.000.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

1. Penyediaan Makanan dengan anggaran Rp. 25.000.000,-*(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)*, dengan jumlah target sebanyak 10 orang.
2. Penyediaan tempat penampungan pengungsi dengan anggaran Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jumlah target sebanyak 11 orang
3. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dengan anggaran Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan Jumlah target 10 Orang
4. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan anggaran Rp. 170.000.000,- *(Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)* dengan jumlah target 22 Orang

c) Program dari Pusat (APBN)

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tahun 2023 sebanyak 3.974 KPM dengan rincian Disabilitas 237 KPM dan Lanjut Usia sebanyak 3.737 KPM. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.384.400.000,-*(Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)* per triwulan atau senilai Rp. 600.000,-*(Enam Ratus Ribu Rupiah)*/KPM
2. Bantuan logistik bencana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Dukungan Personil

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2024 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, PHL sebanyak 41 (Enam Puluh Satu) orang dan Tenaga Pendamping sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) orang, dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural sebanyak 14 (Empat Belas) Orang, terdiri dari:
   - Eselon II : 1 (Satu) Orang
   - Eselon III : 4 (Empat) Orang
   - Eselon IV : 2 (Dua) Orang
   - Pejabat Fungsional : 14 (Lima) Orang
b. Pegawai Harian Lepas sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Orang
c. Tenaga Pendamping sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Orang
   - Pendamping Disabilitas : 1 (Satu) Orang
   - Pendamping Anak : 1 (Empat) Orang
   - Taruna Siaga Bencana : 22 (Dua Puluh Dua) Orang
   - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) : 11 (Sebelas) Orang
   - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) : 30 Orang

5. Hasil Capaian

Tabel 4.27

Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	2024	Layanan data dan pengaduan	100%	100%	2024	
						Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	100%	2024	
						Penyediaan permakanan	100%	100%	2024	
						Penyediaan sandang	100%	100%	2024	
						Penyediaan alat bantu	100%	100%	2024	
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	100%	2024	
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	100%	2024	
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100%	100%	2024	
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan				
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100%	100%	2024	
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	100%	2024	
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	100%	2024	
						Layanan rujukan	100%	100%	2024	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2024	Layanan data dan pengaduan	100%	100%	2024	
						Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	100%	100%	2024	
						Penyediaan permakanan	100%	100%	2024	
						Penyediaan sandang	100%	100%	2024	
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	100%	2024	
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dan sosial				
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	100%	100%	2024	
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100%	100%	2024	
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100%	100%	2024	
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	100%	2024	
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	100%	2024	
						Layanan rujukan	100%	100%	2024	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2024	Layanan data dan pengaduan	100%	100%	2024	
						Penyediaan layanan kedaruratan /	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						layanan reaksi cepat				
						Penyediaan permakanan	100%	100%	2024	
						Penyediaan sandang	100%	100%	2024	
						Penyediaan alat bantu	100%	100%	2024	
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	100%	2024	
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	100%	2024	
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	100%	100%	2024	
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	100%	100%	2024	
						Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	100%	100%	2024	
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	100%	2024	
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Layanan rujukan	100%	100%	2024	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2024	Layanan data dan pengaduan	100%	100%	2024	
						Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	100%	2024	
						Penyediaan permakanan	100%	100%	2024	
						Penyediaan sandang	100%	100%	2024	
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	100%	2024	
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	100%	2024	
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	100%	100%	2024	
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						/ Bukti dokumen kependudukan				
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100%	100%	2024	
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	100%	2024	
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	100%	2024	
						Layanan rujukan	100%	100%	2024	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	2024	Penyediaan permakanan	100%	100%	2024	
						Penyediaan sandang	100%	100%	2024	
						Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%	100%	2024	
						Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%	100%	2024	
						Pelayanan dukungan	100%	100%	2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Psikososial				

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam penerapan SPM sehingga masih ada beberapa sub kegiatan/indikator yang tidak dianggarkan sehingga mempengaruhi capaian keterisian data dalam pelaporan SPM di website.
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendamping, khususnya tenaga pendamping di lapangan sehingga kurang optimal dalam melakukan pelayanan.
3. Belum tersedianya sarana rumah singgah yang digunakan sebagai penampungan sementara bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai, masih perlu penambahan komputer, laptop, printer dan penambahan ruangan kantor serta pengadaan operasional roda 4 dan roda 2 untuk penanggulangan bencana.
5. Belum optimalnya pengumpulan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

b. Solusi

1. Diusulkan penambahan pegawai khususnya pekerja sosial (Tenaga Pendamping) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Perlu adanya diklat-diklat atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM para pendamping sosial.
3. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana untuk anggaran Tahun 2025 yang akan datang, terutama untuk pembangunan rumah singgah dan sarana prasana lain yang mendukung dalam pencapaian SPM.
4. Mengharapkan kucuran bantuan dana pembangunan yang lebih banyak dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
5. Perlu adanya kerjasama yang lebih intens dengan para TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam pengumpulan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
6. Perlu Adanya Regulasi Perhitungan Kebutuhan Dasar sehingga memudahkan dalam Perhitungan Kebutuhan Dasar dalam Penerapan SPM.

4.7. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Adapun pembagian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

Tabel 4.28
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**26.548.433.150**	**25.774.459.822**	**97,08**	**APBD**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**18.770.087.650**	**18.137.266238**	**96,63**	**APBD**
	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.423.750.000	2.375.249.750	98,00	APBD
	2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.107.944.300	2.087.664.500	99,04	APBD
	3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.525.680.000	1.525.480.000	99,99	APBD
	4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.000.000	100.000.000	100,00	APBD
	5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.000.000	75.000.000	100,00	APBD
	6. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	181.037.300	180.518.000	99,71	APBD
	7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56.890.900	56.606.900	99,50	APBD
	8. Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	110.000.000	107.135.000	97,40	APBD
	9. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	336.000.000	334.572.950	99,58	APBD

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	10. Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.651.846.000	3.533.893.390	96,77	APBD
	11. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.201.939.150	7.761.145.748	94,63	APBD
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	**3.472.104.000**	**3.405.285.900**	**98,08**	**APBD**
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.157.424.000	1.102.113.000	95,22	APBD
	2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	739.607.200	738.578.400	99,86	APBD
	3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	427.700.000	427.280.000	99,90	APBD
	4. Penyediaan Pendidik, dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	697.200.000	697.200.000	100,00	APBD
	5. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	69.448.000	69.061.000	99,44	APBD
	6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	45.945.600	45.659.500	99,38	APBD
	7. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	263.099.300	262.883.100	99,92	APBD
	8. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan tenaga Kependidikan	56.890.900	56.516.900	99,34	APBD
	9. Pembangunan Ruang Kelas Baru	14.789.000	5.994.000	40,53	APBD
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**2.410.389.200**	**2.393.434.300**	**99,30**	**APBD**
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	114.293.200	105.410.000	92,23	APBD
	2. Pengadaan Alak Praktik dan Peraga Siswa PAUD	309.400.000	309.400.000	100,00	APBD
	3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	652.800.000	652.800.000	100,00	APBD
	4. Pembinaan dan Kelembagaan Manajemen PAUD	309.267.100	306.448.600	99,09	APBD
	5. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	70.433.100	70.220.000	99,70	APBD
	6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	143.000.000	142.970.000	99,98	APBD
	7. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	593.976.150	592.927.300	99,82	APBD
	8. Pembangunan Ruang Kelas Baru	217.220.000	213.258.400	98,18	APBD
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**1.895.852.300**		**96,97**	**APBD**

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	1. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	481.577.300	481.319.934	99,95	APBD
	2. Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.328.832.700	1.272.175.450	95,74	APBD
	3. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	85.442.300	84.978.000	99,46	APBD
2.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**333.228.500**	**316.144.500**	**94,87**	**APBD**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenega Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**333.228.500**	**316.144.500**	**94,87**	**APBD**
	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	156.115.000	155.447.200	99,57	APBD
	2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	177.113.500	160.697.300	90,73	APBD
	TOTAL ANGGARAN	**26.881.661.650**	**26.090.604.322**	**97,06**	

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
		A. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.858.526.033	3.686.367.333	95,54
		1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.858.526.033	3.686.367.333	95,54

1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.350.300.000	1.298.511.000	96,16
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	378.819.000	321.249.000	84,80
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	96.707.233	96.707.233	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	84.005.000	82.050.000	97,67
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	558.750.000	552.000.000	98,79
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	120.000.000	119.849.000	99,87
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	203.400.000	201.050.000	98,84
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	107.935.000	107.935.000	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	254.949.800	254.949.800	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	78.710.000	70.770.000	89.91
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	481.250.000	442.396.300	91,93
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	143.700.000	138.900.000	96,66

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Adapun pembagian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

Tabel 4.30
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Ket
1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**4.375.226.001**	**3.793.697.076**	**87,18**	
	- Pengelolaan dan Pengambangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.375.226.001	3.793.697.076	87,18	Dinas PUTR
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**6.335.102.748**	**5,028.281.818**	**79,37**	**Dinas Kesehatan**
	- Penyediaan layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.294.602.748	4.987.781.818	79,23	Dinas Kesehatan
		40.500.000	40.500.000	100	Dinas Kesehatan
3	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	- Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	-	-	-	-

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.31
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

URAIAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengembangan Perumahan			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota • Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani • Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 30.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 18.653.000,-	Rp. 30.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 18.653.000,-
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus • Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	Rp. 46.089.000,-	Rp. 46.089.000,-
TOTAL		Rp. 109.742.000,-	Rp. 109.742.000,-

5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar

telah menetapkan program dan Kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.32
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu (RP)	Realisasi (RP)	
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.055.032.700	1.034.787.188	1.134,10
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	370.028.700	366.215.800	362,41
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	168.397.000	166.065.500	98,62
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan ,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan	199.409.900	198.163.800	99,38
		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.756.300	1.661.500	94,60

		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	465.500	325.000	69,82
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	673.406.100	657.591.388	581,48
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	25.190.000	24.230.000	96,19
		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.399.800	2.250.000	93,76
		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	3.935.500	3.854.800	97,95
		Sosialisasi penegakan Perauran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	115.444.000	114.783.800	99,43
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	234.149.200	221.631.088	94,65
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	292.287.600	290.841.700	99,51
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11.597.900	10.980.000	190,20
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	9.197.900	8.680.000	94,37

		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2.400.000	2.300.000	95,83

B. SUB URUSAN KEBENCANAAN

Tabel 4.33

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	90.985.000,-
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	102.655.000,-
				Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,-
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penanggulangan bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,-
				Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	37.490.000,-
				Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	221.939.200,-

C. SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

Tabel 4.34
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	445.000.000	442.609.400	794,88
		Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.563.250	279.246.000	496,54
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.287.450	20.209.100	99,61
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.579.800	138.425.300	99,89
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	63.512.600	63.190.500	99,49
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Pelindung Diri	35.551.000	34.985.100	98,41
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	22.632.400	22.436.000	99,13
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	49.528.100	49.372.000	99,68
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	49.528.100	49.372.000	99,68
		Investigasi Kejadian Kebakaran	13.591.900	13.524.000	99,50
		Investigasi Kejadian Kebakaran,Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	13.591.900	13.524.000	99,50
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahaan Kebakaran	101.316.750	100.467.400	99,16
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahaan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	101.316.750	100.467.400	99,16

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang menjadi pendukung tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial antara lain :

Tabel 4.35

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	163.400.000	161.991.900	99.13
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	163.400.000	161.991.900	99.13
		Penyediaan Permakanan	132.400.000	132.400.000	100
		Pemberian Layanan Kedaruratan	10.000.000	9.766.300	97.66
		Pemberian Layanan Rujukan	20.000.000	18.825.600	94.12
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	1.000.000	1.000.000	100
B	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	240.000.000	236.560.100	98.56
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	70.000.000	67.006.300	95.72
		Penyediaan Makanan	25.000.000	24.213.800	96.85
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.000.000	28.156.000	93.85
		Penanganana Khusus Bagi Kelompok Rentan	15.000.000	14.636.500	97.57
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	170.000.000	169.553.800	99.73
		Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	170.000.000	169.553.800	99.73

BAB V
P E N U T U P

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini disusun sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 diuraikan dalam dokumen ini, diharapkan akan menjadi komitmen bersama untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Ucapan Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan dan mengemban tugas menyiapkan Kabupaten Kepulauan Selayar agar ke depannya semakin maju dan sejahtera.

Sekian dan Terima kasih.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUHAMMAD NATSIR ALI

L A M P I R A N

PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DARI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	
				RKPD	RPJMD
Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	**Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah**	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka/ Huruf	68,00 (B)	68,00 (B)
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75,00	75,00
		Nilai Sakip Daerah	Angka/ Huruf	70,00 (BB)	70,00 (BB)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka/ Huruf	73,943 (Perlu Perbaikan)	73,943 (Perlu Perbaikan)
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	Angka	0,339	0,310
	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka/ Huruf	0,7000 (Maju)	0,7000 (Maju)
Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	**Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan**	Rasio Gini	Angka	0,339	0,310
	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka/ Huruf	0,7000 (Maju)	0,7000 (Maju)
	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,44	69,00
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	64,19	55,83
		Indeks Kesehatan	Angka	78,81	68,99
	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	5,19	6,50-8,00
		PDRB Perkapita	Juta Rp.	55,00	55,00
	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	16,00	15,00
Peningkatan investasi sektor unggulan	**Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman**	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	5,19	6,50-8,00
		PDRB Perkapita	Juta Rp.	55,00	55,00

daerah	Meningkatnya Usaha Perikanan	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	28,00	28,00
	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	6,41	6,41
	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	16,00	15,00
Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasisi potensi desa	**Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan**	Rasio Gini	Angka	0,339	0,310
	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan	Tingkat Penganggura n Terbuka	%	1,31	2,20
		Tingkat Kemiskinan	%	11,03	10,00
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	Angka	0,339	0,310
	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka / Huruf	0,7000 (Maju)	0,7000 (Maju)
Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	**Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia**	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,44	69,00
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	64,19	55,83
		Indeks Kesehatan	Angka	78,81	68,99
	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	Rp.	9.700.000	9.700.000
	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	48,00	48,00
	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasika n pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,7500	0,7100
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	78,15	67,30

	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	Kasus	105	105
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	Angka	0,339	0,310
	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka / Huruf	0,7000 (Maju)	0,7000 (Maju)
Peningkatan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana.	**Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka / Huruf	66,14 (Cukup Baik)	64,80 (Cukup Baik)
	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	Angka	56,00	56,00
		Indeks Kualitas Udara	Angka	89,49	85,59
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	47,56	47,56
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	Angka	0,339	0,310
	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka / Huruf	0,7000 (Maju)	0,7000 (Maju)
	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,44	69,00
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	64,19	55,83
		Indeks Kesehatan	Angka	78,81	68,99

Prioritas Pembangunan Tahun 2023/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi sistem pelayanan publik			
Mewujudkan reformasi birokrasi daerah	Indeks reformasi birokrasi	Angka/ Huruf	64 (CC)
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhdap pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	72,50
	Nilai sakip daerah	Angka/ Huruf	65 (B)
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka/ Kategori	72,015 (perlu perbaikan)
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persen	100
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100

Prioritas Pembangunan Tahun 2023/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
	Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100
Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persen	90,40
	Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	100
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	20
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	85
Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3
Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	5,50
Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Persen	98
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	35
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (SPM)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100
Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	0,25
Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Persen	100
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Persen	85
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persen	100
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Persen	100
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya unggulan			
Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan merata serta sesuai sistem penataan dan pemanfaatan ruang			
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	Angka	0,329
Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	Angka/ Kategori	0,665 (Berkembang)
Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	72,31
	Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	Persen	85
	Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	Persen	98,50
Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	Persen	100
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembagan kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	Persen	33,33
Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persen	3,70
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian	Persen	100
Program pemberdayaan masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam	Persen	100

Prioritas Pembangunan Tahun 2023/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
desa dan kelurahan	Perencanaan Pembangunan		
Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	4,40
Program pengelolaan persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	Persen	1,30
Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasiraan bencana	Persen	100
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	Medali	50
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Persen	40
Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,01
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,16
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	1,17
Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	25
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Persen	100
Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	22,72
Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Persen	3,16
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)		
	BKB	Persen	0,74
	BKR	Persen	0,61
	BKL	Persen	0,62
	PIK R	Persen	0,51
	UPPKS	Persen	0,91
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing			
Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,71
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	54,19
	Indeks Kesehatan	Angka	68,81
Program pengelolaan pendidikan (SPM)	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	100
	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Persen	100
	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100

Prioritas Pembangunan Tahun 2023/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasiltasi	Persen	38,12
Program rehabilitasi sosial (SPM)	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100
	PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	21,32
Program penanganan bencana (SPM)	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100
Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	Persen	90
	Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	38
	Persentase Luas Daerah irigasi kewenagan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	Persen	1,85
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100
Program pengembangan perumahan (SPM)	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100
	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	1,41
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100
	Waktu Tanggap *(Response Time)* Penangnan Kebakaran	Menit	10,93
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Persen	36,36

Prioritas Pembangunan Tahun 2023/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	78,80
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Angka	36/100.000 Penduduk
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100
	Persentase Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100
	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Utama
Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan	Rupiah	9.450.000
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau	Persen	100
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Persen	100
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya unggulan			
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	5,15 – 5,97
	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	53,50
Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	27
Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	24
Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.593
Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.054,9

Prioritas Pembangunan Tahun 2023/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	201,49
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	Persen	40
Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen	5,59
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	Persen	6
Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	5
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten KepulauanSelayar	Persen	10
	Tingkat huniaan akomodasi	Persen	10
Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pandaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Persen	100
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Persen	100
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100
Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Persen	19
Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Persen	15
Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Persen	14
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	59.000
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	Persen	100
Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Persen	60,66
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	Persen	30,77
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing			
Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	44
Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,7000
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100
Program pengembangan kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persen	100

Prioritas Pembangunan Tahun 2023/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Target 2023
1	2	3	4
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	Persen	0
Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	65,15
Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	Kasus	115
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Persen	1
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100
Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati			
Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka (Kategori)	64,80 (Cukup Baik)
Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	Angka	54
	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,49
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	45,06
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Angka	2,59
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	1,38
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	Persen	64
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	Persen	100